



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 -2029



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (*RENSTRA*) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029, penyesuaian dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022-2029.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang pada khususnya

Kuala Tungkal, Oktober 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



HERMANSYAH, S.STP.MH

Pembina Utama Muda(IVc)

NIP. 19820411 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB. I. PENDAHULUAN ..	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	8
2.1.1 Susunan Organisasi	9
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah	25
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	30
2.1.4 Peluang & Tantangan Pengembangan Pelayanan Setda	55
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	60
2.2.1 Indikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	
pelayanan perangkat daerah	60
2.2.4 Telaah Visi, Misi dan Program Kepada Daerah dan Wakil Kepala	
Daerah.....	65
2.2.5 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	84
2.2.6 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
Hidup	85
2.2.7 Isu Strategis Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	88
BAB. III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	91
3.1 Tujuan Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2025-2029	91
3.2 Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2025-2029	92
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah	97
3.3.1 Strategi Renstra Sekretariat Daerah	97
3.3.2 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah	101
BAB. IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN.....	113
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Rencana Pendanaan	113
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	145
BAB. V. PENUTUP.....	154

DAFTAR TABEL

Tabel	Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Indikator Kinerja Utama periode 2021-2026	31
Tabel	Formulir E-80 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026	38
Tabel	Evaluasi Anggaran Pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026	48
Tabel	Visi dan Misi, Sasaran, Arah Pembangunan dan arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2025-2029	69
Tabel	Tabel 3.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah 2025-2029 Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	93
Tabel	Rumusan Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Sekretaria Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ..	95
Tabel	3.3.1 Strategi Renstra Sekretariat Daerah	98
Tabel	3.3.2 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah	102
Tabel	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	106
Tabel	4.1. Rumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sekretariat Daerah	114
Tabel	Program Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 2025-2029	123
Tabel	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	127
Tabel	Daftar Sub Kegiatan pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	142
Tabel	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Penyelenggara Urusan	147
Tabel	Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Urusan.....	148
Tabel	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Bidang Urusan	150
Tabel	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
5. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029.

Rencanan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

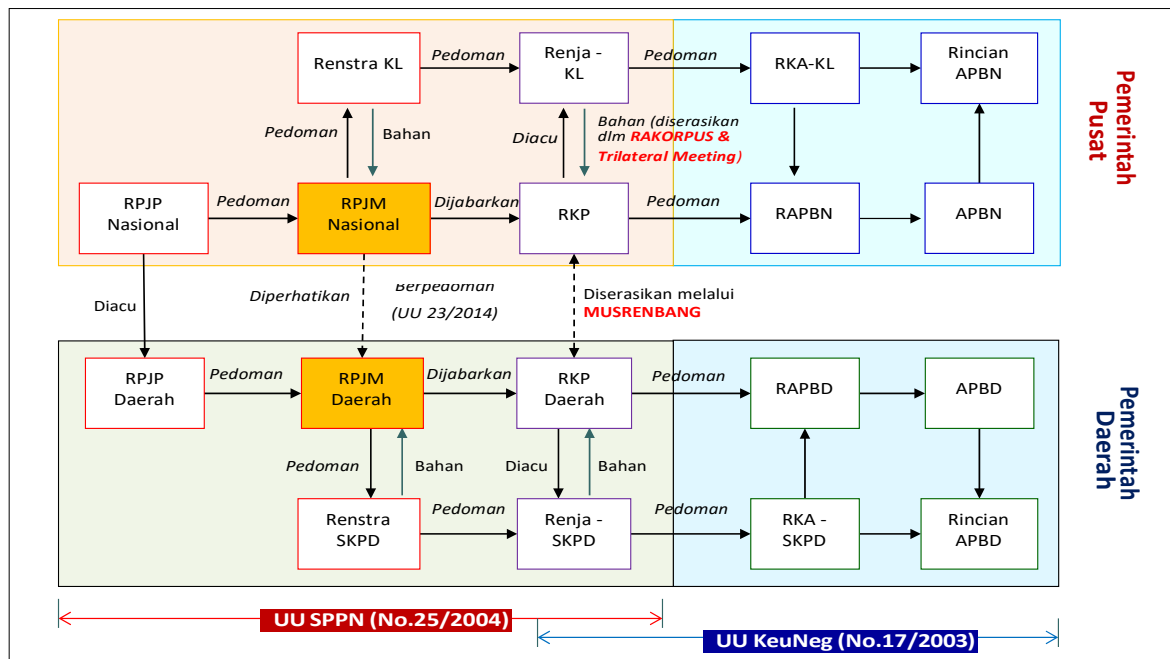
Renstra PD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain :

- kemana pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun,
- bagaimana mencapainya dan,
- Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Adapun hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Hubungan RPJMD dengan Renstra PD dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabiupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencanan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

- Memberikan arah dan pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka 5 (Lima) Tahun dan menjadi alat kendali manajemen dan akuntabilitas kinerja instansi.

Adapun tujuan penyusunan renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah selaku unsur staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan selaku unsur staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
3. Menjadi acuan kerja resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan penganggaran.
5. Memberikan tolak ukur kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka menengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 berupa gambaran landasan yang mendasari disusunnya Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat daerah, mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menyajikan data-data dan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dan isu-isu Strategis yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini memberi keterangan tentang rumusan tujuan dan saran yang ingin dicapai perangkat daerah tahun 2025-2029, Strategi atau rencana tindakan yang komprehensif yang berupa langkah-langkah atau upaya yang dilakukan dalam menecapai tujuan dan sasaran Renstra, serta arah kebijakan Perangkat Daerah yang merupakan operasionalisasi norma, standar, prosedur dan kreteria (NSPK) sesuai denga tugas dan fungdi perangkat daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan program, kegiatan, subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target kinerja dan pendanaan indikatif serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.1 SUSUNAN ORGANISASI

Tipologi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Sekretariat Daerah merupakan tipe A yang terdiri atas 3 (tiga) asisten dan 12 (Dua Belas) bagian yang masing-masing asisten terdiri atas 4 (Empat) bagian. Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat terdiri atas 4 (Empat) Bagian yaitu :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - c. Bagian Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. Bagian Kerja sama terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
2. Asisten Pembangunan dan Perekonomian terdiri atas 4 (Empat) Bagian yaitu :
 - a. Bagian Perekonomian terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
 - d. Bagian Sumber Daya Alam terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
3. Asisten Administrasi Umum terdiri atas 4 (Empat) bagian yaitu :
 - a. Bagian Umum terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - b. Bagian Organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
 - c. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas :
 - Subbagian Protokoler; dan
 - Kelompok jabatan fungsional

Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Pemerintahan Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kerja Sama

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi

pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
- c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Sumber Daya Alam

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan serta rumah tangga;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan serta rumah tangga; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Protokol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Subbagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi serta penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya lingkup keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Protokol mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan lingkup sekretariat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Peencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan; dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Staf Ahli

- 1. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- 2. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Staf Ahli, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberian telaah dibidang pemerintahan;
- b. Pelaksanaan pemberian telaah dibidang ekonomi dan pembangunan; dan
- c. Pelaksanaan pemberian telaah dibidang hukum dan politik.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaah terhadap isu-isu strategis kepada Bupati untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi:

- a. pengembangan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. Administrasi pemerintahan daerah dan administrasi umum;

- c. Kerjasama antar daerah;
- d. pertanahan /keagrariaan dan batas wilayah;
- e. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Ketentraman dan ketertiban;
- g. penyelenggaraan pendidikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. Penyelenggaraan kesehatan;
- i. Kearsipan dan perpustakaan;
- j. Sosial;
- k. Keagamaan dan kesejahteraan rakyat;
- l. Kepemudaan dan olahraga;

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaah terhadap isu-isu strategis kepada bupati untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ekonomi dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi:

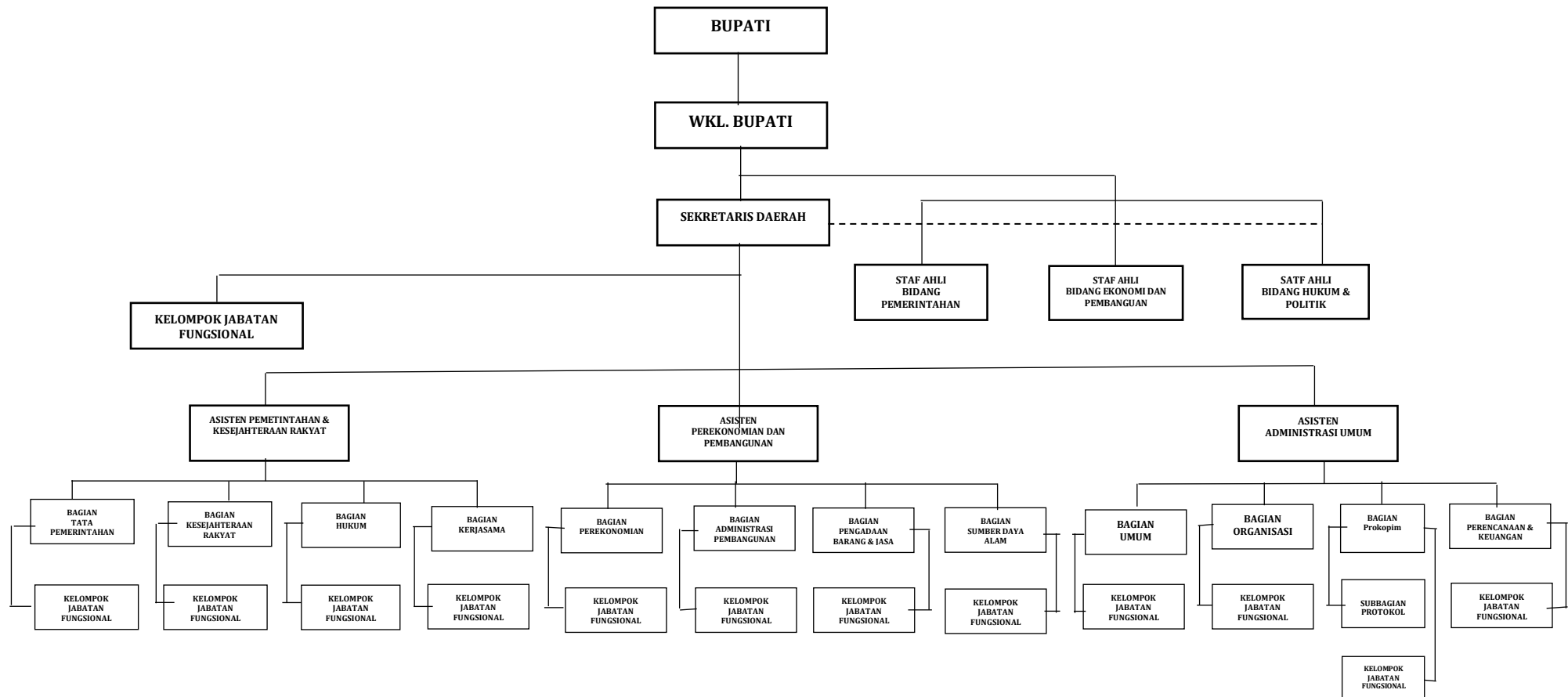
- a. Pengembangan potensi ekonomi daerah;
- b. Perekonomian, penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- c. Poperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan dan jasa;
- d. Ketenagakerjaan;
- e. Pertanian dan ketahanan pangan;
- f. Pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah;
- g. Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- h. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- i. Badan usaha milik daerah;
- j. Perencanaan dan pembangunan daerah;
- k. Pekerjaan umum dan penataan ruang perkotaan;
- l. Pengembangan transportasi perhubungan;
- m. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- n. Perikanan.

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan telaah terhadap isu-isu strategis kepada bupati untuk pengambilan dan pelaksanaan kebijakan dibidang hukum dan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi:

- a. Penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima;
- b. Penegakan peraturan daerah dan peraturan perundangan-undangan;
- c. Kajian produk hukum daerah;
- d. Penegakan hukum dan masalah hak azazi manusia;
- e. Penyelesaian sengketa pemerintah daerah;
- f. Hubungan antar lembaga dan politik serta pendidikan politik;
- g. Pembinaan kehidupan berbangsa, bernegara dan perlindungan masyarakat.
- h. Kelembagaan;
- i. Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- j. Tata laksana dan pendayagunaan aparatur.

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



2.1.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

A. Tingkat Pendidikan Aparatur

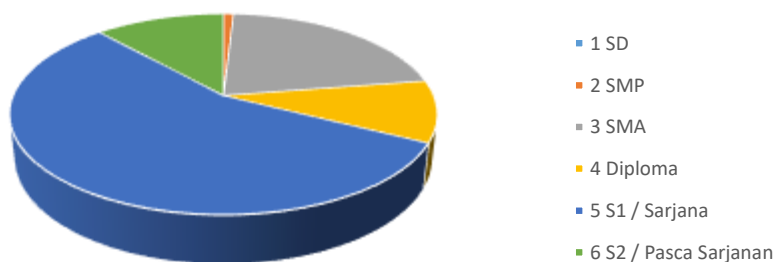
Latar belakang pendidikan pegawai secara umum merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur kompetensi pegawai, menjamin terlaksana dan tercapainya kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat. Hal ini terjadi jika penempatan pegawai sesuai dengan prinsip “The Right Man On The Right Place”, namun demikian seiring bertambahnya pengalaman dan kinerja pegawai yang berbeda-beda di lapangan kadang mempengaruhi penempatan pegawai pada bidang dan sub bidang kerja/tugas tertentu.

ASN di Sekretariat Daerah sesuai tingkat Pendidikan terdiri dari 111 orang PNS, terdapat sebanyak 13 orang PNS (11,71 %) dengan pendidikan S2, 56 orang PNS (50,45 %) dengan pendidikan S1, 11 orang PNS (9,91 %) dengan pendidikan Diploma, 24 orang PNS (21,62 %) dengan pendidikan SMA, 1 orang PNS (0,90%) dengan Pendidikan.

Daftar ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	ASN
1	Sekolah Dasar (SD)	0
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	24
4	Diploma	11
5	S1 / Sarjana	62
6	S2 / Pasca Sarjana	13
	Jumlah	111

Grafik ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Pendidikan



DAFTAR ASN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	Unit Kerja	S2	S1	Diploma	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Sekda	1						1
2.	Aistsen	2						2
3.	Staf Ahli	3						3
4.	Bagian Tata Pemerintahan		4		2			6
5.	Bagian Kesejahteraan Rakyat		9	1	1			11
6.	Bagian Hukum	2	3		1			6
7.	Bagian Kerjasama		5					5
8.	Bagian Perekonomian		5		2			7
9.	Bagian administrasi Pembangunan	1	2	1	2			6
10.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	8	3	4			16
11.	Bagian Sumber Daya Alam	1	5					6
12.	Bagian Organisasi	1	5		1			7
13.	Bagian Umum		5		7	1		13
14.	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan		3	5	3			11
15.	Bagian Perencanaan dan Keuangan		4	2	4			10
Jumlah		12	58	12	27	1	0	110

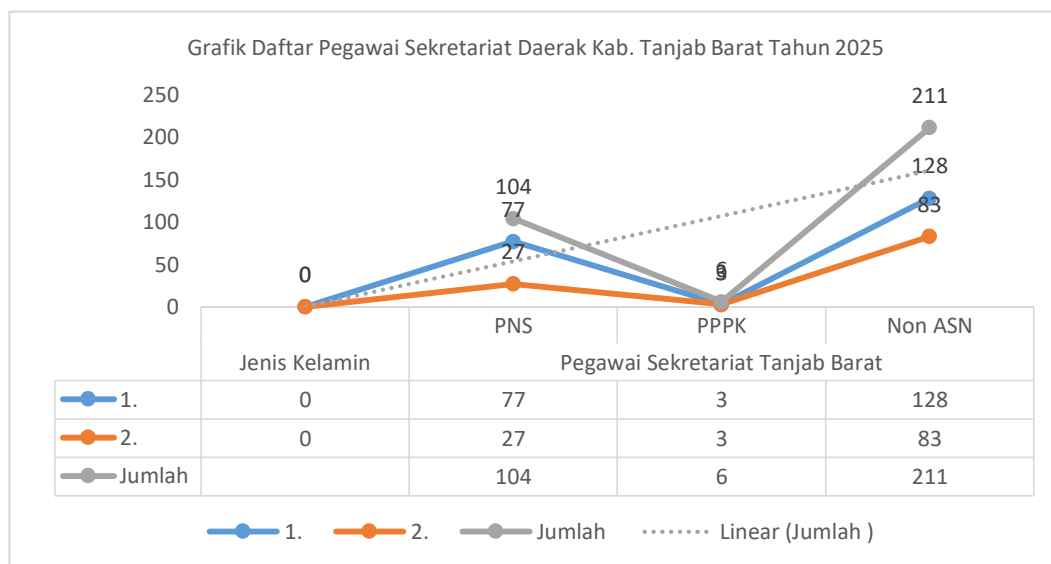
Daftar Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Golongan I			
1. I/A (Juru Muda)	-	-	-
2. I/B (Juru Muda Tk.I)	-	-	-
3. I/C (Juru)	-	-	-
4. I/D (Juru Tk.I)	-	-	-
Golongan II			
5. II/A (Pengatur Muda)	2	-	2
6. II/B (Pengatur Muda Tk.I)	-	-	-
7. II/C (Pengatur)	-	-	-
8. II/D (Pengatur Tk.I)	9	2	11
Golongan III			
9. III/A (Penata Muda)	20	12	32
10. III/B (Penata Muda Tk.I)	7	4	11
11. III/C (Penata)	10	2	12
12. III/D (Penata Tk.I)	17	3	20
Golongan IV			

13. IV/A (Pembina)	2	-	2
14. IV/B (Pembina Tk.I)	6	3	9
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	3	1	4
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	1	-	1
17. IV/E (Pembina utama)	-	-	-
Jumlah	77	27	104

Daftar Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025

No	Jenis Kelamin	Pegawai Sekretariat Tanjab Barat			Jumlah
		PNS	PPPK	Pegawai Honorer	
1.	Laki-Laki	77	3	128	208
2.	Perempuan	24	3	83	113
Jumlah		104	6	211	321



Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki SDM yang cukup beragam. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki pegawai sebanyak 321 orang, yang terdiri dari 104 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 Orang Pegawai PPPK dan 211 Pegawai Non ASN.

Jumlah Pejabat Eselon II sebanyak 6 Orang PNS, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, serta 3 Orang Staf Ahli. Eselon III Terdiri atas 11 orang PNS Kepala Bagian dan 1 Orang PNS Pejabat Eselon IV yaitu Kasubbag Protokol, serta Pejabat Fungsional Teknis sebanyak 37 Orang PNS dan Pejabat Fungsional Pelaksana/Umum sebanyak 51 Orang PNS.

B. PENEMPATAN APARATUR

Untuk mengetahui bagaimana keberadaan ASN di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dilihat dari berbagai sisi ;

- 1) Jumlah Aparatur (PNS) yang bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 104 orang, dengan rincian 77 orang laki-laki dan 27 orang perempuan.
- 2) Komposisi jumlah laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan struktural (eselon) di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:
 - a) Jumlah Pejabat Eselon IIA sebanyak 1 (satu) Orang laki-laki.
 - b) Jumlah Pejabat eselon IIB dan setara eselon IIB sebanyak 5 Orang, terdiri dari 4 (Empat) laki-laki, 1 (satu) perempuan dan 1 Orang Laki-Laki menjabat Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat
 - c) Jumlah Pejabat eselon IIIA sebanyak 11 Orang, terdiri dari 8 (Delapan) orang laki-laki dan 3 (Tiga) orang perempuan serta 1 Orang laki-laki menjabat sebagai Plt. Kabag Administrator Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
 - d) Jumlah Pejabat eselon IVA sebanyak 1 (satu) orang laki-laki
- 3) Penempatan PNS per Bagian dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja (Bagian-Bagian) di Sekretariat Daerah.

- a) Persebaran penempatan PNS pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum merata dan berimbang. Beberapa jabatan fungsional yang disetarakan pada bagian memiliki kekosongan dan stap PNS. Kekurangan pejabat fungsional dan staf PNS ini sangat berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kinerja kegiatan-kegiatan administrasi dan teknis di masing-masing bagian.
- b) Untuk itu kedepan diperlukan penataan penempatan PNS pada setiap unit kerja lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang disesuaikan dengan Analisis Beban Kerja masing-masing jabatan dan tingkat kompetensi yang sesuai.

Komposisi Penempatan Aparatur Per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah

No.	Unit Kerja	Jumlah			
		PNS	PPPK	Non ASN	Total
1.	Sekda	1			1
2.	Aistsen	2			2
3.	Staf Ahli	3			3
4.	Bagian Tata Pemerintahan	6		4	10
5.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11		6	17
6.	Bagian Hukum	4	2	11	17
7.	Bagian Kerjasama	5		4	9
8.	Bagian Perekonomian	6	1	6	13
9.	Bagian administrasi Pembangunan	5	1	5	11
10.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	16		10	26
11.	Bagian Sumber Daya Alam	5	1	5	11
12.	Bagian Organisasi	6	1	5	12
13.	Bagian Umum	13		112	125
14.	Bagian Protokoler dan Komunikasi Pompinan	11		33	44
15.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	10		10	20
JUMLAH		104	6	211	321

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurang lebih 4 (Empat) Tahun masa Renstra 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2021-2024.

Melalui Renstra tahun 2021-2026 telah ditetapkan garis-garis besar tujuan, sasaran beserta indikator-indikator terukur bagi arah pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan indikator kinerja utama (IKU) yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2021- 2026 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tujuan, sasaran, indikator-indikator dan capaian target Renstra Tahun 2021-2026, secara umum kinerja pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 4 (empat) tahun telah dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan gambaran pencapaian sebagaimana disajikan pada tabel **Tabel. 2.1.3** dan **E-80** berikut :

Tabel 2.1.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama
Periode Renstra 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Kinerja pada Tahun Ke					Realisasi Target Tahun ke				Rasio Capaian Target Tahun ke			
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang efektif	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	60,30 (B)	70,01 (BB)	62,50 (B)	64,50 (B)	66,50 (B)	68,50 (B)	70,01 (BB)	60,39 (B)	67,77 (B)	71,74 (BB)	77,19 (BB)	97 %	105 %	108 %	113 %
			Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	0	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai target daerah	0	90%	75%	80%	83%	88%	90%	75%	80%	83%	88%	100 %	100 %	100 %	100 %
			Nilai Suvei Kepuasan Masyarakat	89.45	89.00	81	80,8	81	85,5	89.00	89,45	81,39	80,7	83,6	110 %	101 %	100 %	98%
			Nilai Kematangan Perangkat Daerah	0	43	29	32	35	40	43	28,1	30	35	35	97 %	94%	100 %	88%
2.	Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	1.2.Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	Skor LPPD	0	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	0	1>T	3<ST<4	2,44	0%	50%	100 %	80%
			Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	0	98%	85%	87%	90%	95%	98%	85%	87%	90%	95%	100 %	100 %	100 %	100 %
		2.1. Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang keagamaan	86,44%	100%	100 %	100%	100%	100%	100 %	86,44 %	100 %	100%	100%	86 %	100 %	100 %	100 %
			Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 3 Besar	Juar 2 Besar	Juar 2 Besar	Juar 2 Besar	Juar 3 Besar	150 %	150 %	150 %	100 %
		2.2. Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

RENSTRA SETDA 2025-2029

		2.3. Meningkatnya Implementasi kerjasama dalam dan luar negeri	Persentase Naska Kerjasama Lingkup dalam Negeri dan Luar Negeri yang diimplementasikan	75%	95%	80%	83%	86%	89%	95%	80%	83%	86%	89%	100 %	100 %	100 %	100 %
		2.4. Meningkatnya Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplemntasikan	Persentase Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	94%	100 %	100%	100%	94 %	100 %	100 %	100 %
		2.5. Meningkatnya kualitas administrasi Pembangunan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	92%	100 %	100%	100%	92 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penyedia barang dan jasa melalui bagian barang dan jasa	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	62%	100 %	100%	100%	62 %	100 %	100 %	100 %
		2.6..Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan sumber daya alam yang diimplementasikan	100%	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %	80%	100 %	100%	100%	80 %	100 %	100 %	100 %

Dari tabel 2.1.3 Evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masa periode evaluasi 2021-2024 tergambar bahwa tujuan rencana strategis (Renstra) terdiri 2 (dua) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut diatas, maka disusunlah sasaran strategis yang menjadi acuan dan arah pencapaian yang ingin diraih dalam periode Renstra 2021-2026. Adapun sasaran strategis yaitu Terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang efektif, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :
 - a. Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan target kinerja sampai dengan akhir perencanaan ditargetkan nilai 70,01 (BB) dan berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2024 tercapai nilai 77,19 atau dengan kategori BB, dengan demikian target sdh tercapai sesuai target akhir renstra periode 2021-2026, indikator ini sebagai tolak ukur untuk terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sumber data Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, indikator ini disusun sebagai salah satu tolak ukur untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra dalam hal tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien serta bertanggung jawab pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, target indikator kinerja ini adalah 100% setiap tahunnya dengan realisasi setiap tahun selama 4 tahun tercapai 100% dan target akhir renstra adalah 100%. Sumber data Bagian Perencanaan dan Keuangan

- c. Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai target daerah, indikator ini sebagai tolak ukur terwujudnya kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, target kinerja indikator ini sampai dengan tahun ke 4 Renstra Sekretariat Daerah adalah 88% dari 44 Perangkat daerah dan capaian sampai dengan tahun ke-4 sebesar 88% atau sekitar 38 perangkat daerah berkategori baik sesuai dengan target Pemkab. Tanjung Jabung Barat. Sumber data Bagian Organisasi.
 - d. Nilai Suvei Kepuasan Masyarakat, indikator ini digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur seberapa puas masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk Sekretariat Daerah atau unit pelayanan. Target kinerja dari indikator ini sampai dengan tahun ke-4 pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah adalah 85,5 dengan capaian target kinerja samapi tahun ke-4 pelaksanaan renstra Sekretariat Daerah berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh perangkat daerah tercapai 83,6 dengan katagori baik (B) rasio capaian 98%. Sumber data Bagian Organisasi
 - e. Nilai Kematangan Perangkat Daerah. Indikator ini untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah telah menerapkan system manajemen kinerja, akuntabilitas, reformasi birokrasi, atau SPIP (sistem pengendalian intern), target indikator kinerja ini samapi dengan tahun ke-4 adalah 40 dan realisasi capaian sampai dengan tahun ke-4 pelaksanaan renstra adalh 35 atau rasio capaian sebesar 88%. Sumber data Bagian Organisasi.
2. Meningkatkan kualiatas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan ini maka dirumuskanlah sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah merupakan upaya untuk memperkuat kapasitas dan kemandirian pemerintah daerah agar dapat menjalankan kewenangan yang diberikan melalui otonomi daerah secara efektif dan bertanggung jawab, sasaran strategis ini didukung oleh 2 (Dua) indikator sebagai tolak ukur pencapaiannya yaitu :
1. Skor LPPD, skor ini dihasilkan dari penilaian atas indikator-indikator kinerja utama dan digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya. Realisasi dari target kinerja ini sampai dengan tahun pelaksanaan Renstra 2024 adalah 2,44 atau katagori sedang target tidak tercapai, karena adanya indikator utama yang tidak bias dipenuhi. Sumber data Bagian Tata Pemerintahan.
 2. Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik, indikator ini digunakan untuk mengukur berapa banyak kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan kinerja pemerintah yang baik dibandingkan dengan jumlah kecamatan. Target kinerja pada Renstra samapi dengan tahun 2024 adalah 95% dan capaian kinerja sebesar 95% atau rasio capaian 100%. Sumber data Bagian Tata Pemerintahan.
- b. Sasaran Strategis Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Relegius dalam kehidupan bermasyarakat, terdiri atas 2 (Dua) Indikator sebagai tolak ukur pencapaian target kinerja yaitu :
1. Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang keagamaan, target renstra sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dan realisasi sampai dengan tahun 2024 adalah 100% atau rasio 100%. Sumber data Bagian Kesejahteraan Rakyat

2. Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi dengan target setiap tahun dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 adalah juara umum 3 dan realisasi pada tahun 2024 adalah juara umum 3 dengan rasio capaian 100%. Sumber data Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c. Sasaran Strategis Terwujudnya Harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator/tolak ukur keberhasilan adalah Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan, target akhir renstra 100% dan sampai dengan tahun 2024 tercapai 100%. Sumber data Bagian Hukum
- d. Sasaran Strategis Meningkatnya Implementasi kerjasama dalam dan luar negeri merupakan pelaksanaan konkrit dari kesepakatan atau nota kesepahaman (MoU) yang telah dibuat, yang melibatkan kegiatan nyata. Untuk mencapai sasaran ini maka dirumuskan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan adalah Persentase Naskah Kerjasama Lingkup dalam Negeri dan Luar Negeri yang diimplementasikan dengan target kinerja renstra sampai dengan tahun 2024 sebesar 89% dan tercapai 89% atau rasio capaian 100%. Sumber data Bagian Kerjasama.
- e. Sasaran Strategis Meningkatnya Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan, dengan Indikator Kinerja Persentase Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan, target dari indikator kinerja ini adalah 100% setiap tahun selama 5 tahun dan capaian sampai dengan tahun ke-4 (tahun 2024) adalah 100% dengan rasio capaian 100%. Sumber data Bagian Perekonomian
- f. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas administrasi Pembangunan Daerah terdiri dari 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan, target kinerja renstra selama 5 Tahun adalah 100% dan capaian tiap tahun sampai dengan tahun ke-4 pelaksanaan renstra adalah 100%. Sumber data Bagian Administrasi Pembangunan.
- b. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penyedia barang dan jasa melalui bagian barang dan jasa, target indikator kinerja utama ini selama 5 tahun masa renstra 2021-2026 adalah 100% dan realisasi kinerja dari tahun 2021-2024 adalah 100%. Sumber data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- g. Sasaran Strategis Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam dengan indikator Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan sumber daya alam yang diimplementasikan, target kinerja Renstra selama 2021-2026 adalah 100% dan capaian target kinerja selama 2021-2024 adalah 100% atau rata-rata rasio capaian 100%. Sumber data Bagian Sumber Daya Alam.

RENSTRA SETDA 2025-2029

Formulir E.80

Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Tahun ke-			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22
			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
1	Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	60,39 (B)	70,01 (BB)	60,39 (B)	62,50 (B)	64,50 (B)	66,50 (B)	68,50 (B)	70,01 (BB)	60,39 (B)	67,77 (B)	71,74 (BB)	77,19 (BB)	100,00 %	108%	111,22%	116,08%
2.	Persentase Temuan BPK. Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
3	Persentase keberadaan dokumen perencanaan dan pelaporan Sekda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
4	Persentase dokumen perencanaan dgn kondisi berkualitas Baik	70%	90%	70%	72%	75%	80%	85%	90%	70%	72%	100%	80%	100%	100%	75,00%	100,00%
5	Persentase Dokumen Pelaporan dgn kondisi berkualitas Baik	68%	90%	68%	70%	73%	78%	83%	90%	68%	70%	100%	78%	100%	100%	73,00%	100,00%

RENSTRA SETDA 2025-2029

6	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	4 Dok	10 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	10 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
7	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dok	1 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0%	0%	0,00%	100,00%
8	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dok	1 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0%	0%	0,00%	100,00%
9	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	0%	0%	0,00%	100,00%
10	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	0%	0%	0,00%	100,00%
11	Persentase Laporan Keuangan tersusun dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
12	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Org/bln	133 Org/bln	131 Org/bln	131 Org/bln	131 Org/bln	131 Org/bln	131 Org/bln	133 Org/bln	131 Org/bln	131 Org/bln	131 Org/bln	131 Org/bln	100%	100%	100,00%	100,00%
13	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan/1 Dok	1 Dok	12 Bulan/1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	12 Bulan/1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
14	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan/1 Dok	1 Dok	12 Bulan/1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	12 Bulan/1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
15	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	2 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
16	Jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	100,00%	100,00%
17	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100,00%	100,00%
18	Persentase BMD yang terkelola dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
19	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0%	100%	100,00%	100,00%

RENSTRA SETDA 2025-2029

20	Persentase gaji dan Biaya Operasional KDH/WKDH yang dibayarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
21	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/12 Bulan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang/12 Bulan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100%	100%	100,00%	100,00%
22	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	6 Paket	0	-	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	-	-	-	6 Paket	0%	0%	0,00%	100,00%
23	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	2 Orang	2 Orang	-	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	-	-	-	2 Orang	0%	0%	0,00%	100,00%
24	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)	-	89,00	80,66	80,70	80,80	81,00	85,50	89,00	-	80,44	78,55	85,34		99,68%	97,22%	105,36%
25	Persentase fasilitasi penataan administrasi kepegawaian ASN yang up to date	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
26	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	462 Stel	5 Paket	462 Stel	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	462 Stel	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100%	100%	100,00%	100,00%
27	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Aplikasi	3 Dok	2 Aplikasi	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	2 Aplikasi	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
28	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran sekda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
29	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100,00%	100,00%
30	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 item/Jenis	2 Paket	11 item/Jenis	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	11 item/Jenis	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	100%	100,00%	100,00%
31	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Item Jenis	3 Paket	60 Item Jenis	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	60 Item Jenis	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	100%	100,00%	100,00%
32	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100,00%	100,00%
33	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis/Item	2 Paket	6 Jenis/Item	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	6 Jenis/Item	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	100%	100,00%	100,00%
34	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	2 Lap	0	2 Laporan	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	0	2 Lap	2 Lap	2 Lap	0%	100%	100,00%	100,00%

RENSTRA SETDA 2025-2029

35	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan sarpras kantor dan rumah dinas sekda, KDH dan KWDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
36	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30 Jenis/tem	10 Unit	30 Jenis/tem	2 Unit	12 Unit	14 Unit	12 Unit	10 Unit	30 Jenis/tem	2 Unit	12 Unit	14 Unit	100%	100%	100,00%	100,00%
37	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Paket	0	-	-	2 Paket	2 Paket	2 Paket	-	0	-	2 Paket	0%	0%	0,00%	100,00%
38	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	63 Unit	0	45 Unit	50 Unit	53 Unit	55 Unit	63 Unit	-	45 Unit	50 Unit	53 Unit	0%	100%	100,00%	100,00%
39	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
40	Jumlah waktu/Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	2 Lap	12 Bulan	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	12 Bulan	2 Lap	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	100,00%	100,00%
41	Jumlah waktu/Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	3 Lap	12 Bulan	3 Laporan	3 Lap	3 Lap	3 Lap	3 Lap	12 Bulan	3 Lap	3 Laporan	3 Laporan	100%	100%	100,00%	100,00%
42	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1 Lap	12 Bulan	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	12 Bulan	1 Lap	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100,00%	100,00%
43	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Jenis/Item	1 Lap	45 Jenis/Item	1 Laporan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	45 Jenis/Item	1 Lap	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100,00%	100,00%
44	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
45	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	88 Unit	172 Unit	88 Unit	88 Unit	125 Unit	145 Unit	160 Unit	172 Unit	88 Unit	88 Unit	125 Unit	145 Unit	100%	100%	100,00%	100,00%
46	Jumlah Mebel yang dipelihara	-	335 Unit	0	-	313 Unit	325 Unit	330 Unit	335 Unit	-	0	-	325 Unit	0%	0%	0,00%	100,00%
47	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	632 Unit	12 Bulan	518 Unit	600 Unit	625 Unit	628 Unit	632 Unit	12 Bulan	294 Unit	600 Unit	625 Unit	100%	56,76%	100,00%	100,00%
48	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung, 3 Rumdis	15 Unit	1 Gedung, 3 Rumdis	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	1 Gedung, 3 Rumdis	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	100%	100,00%	100,00%
49	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan kerumahtanggaan kantor dan rumah dinas sekda, KDH dan KWDH	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	0%	0,00%	100,00%

RENSTRA SETDA 2025-2029

50	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	0	3 Paket	0	-		3 Paket	3 Paket	3 Paket	0	-		3 Paket	0%	0%	0,00%	100,00%
51	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0	3 Paket	0	-		3 Paket	3 Paket	3 Paket	0	-		3 Paket	0%	0%	0,00%	100,00%
52	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0	3 Paket	0	-		3 Paket	3 Paket	3 Paket	0	-		3 Paket	0%	0%	0,00%	100,00%
53	Nilai Kematangan Perangkat Daerah		43		29	32	35	40	43		28,1	30	35	0%	96,90%	106,67%	100,00%
54	Nilai Suvei Kepuasan Masyarakat	89,45	89,00	80,66	81	80,80	81,00	85,50	89,00	89,45	81,39	80,70	83,60	111%	99,10%	100,12%	96,89%
55	Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai target daerah	70%	90%	70%	75%	80%	83,00%	88%	90%	70%	75%	80%	83,00%	100%	100%	100,00%	100,00%
56	Persentase perangkat daerah yang menyusun LKPJ-IP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
57	Jumlah Perangkat Daerah dengan IKM berpredikat Baik (B)	31 PD	44 PD	31 PD	31 PD	34 PD	37 PD	40 PD	44 PD	31 PD	31 PD	34 PD	37 PD	100%	100%	100,00%	100,00%
58	Persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran	96,73%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	96,73%	96,73	100%	100%	96,73%	96,73%	100,00%	100,00%
59	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dok	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	3 Dok.	100%	100%	100,00%	100,00%
60	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100%	100%	100,00%	100,00%
61	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
62	Persentase kegiatan pimpinan yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
63	Persentase Pengolahan Dokumen laporan kegiatan pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
64	Persentase ketersediaan bahan bacaan pimpinan dan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
65	Persentase pengolahan data dokumentasi kegiatan pimpinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
66	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	100%	100,00%	100,00%

RENSTRA SETDA 2025-2029

67	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	100%	100,00%	100,00%
68	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	100%	100,00%	100,00%
69	Skorr LPPD		3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4	3<ST<4		1,7 T	-	3<ST<4	0%	100%	-	
70	Persentase Kecamatan dengan Kinerja Baik	85%	98%	85%	87%	85%	90%	95%	98%	85%	87%	85%	90%	100%	100%	100,00%	100,00%
71	Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
72	Persentase Permasalahan batas wilayah yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
73	Persentase optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
74	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
75	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
76	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
77	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	3 Besar	3 Besar	3 Besar	3 Besar	3 Besar	3 Besar	3 Besar	3 Besar	2 Besar	2 Besar	2 Besar	3 Besar	150%	100%	66,67%	100,00%
78	Persentase koordinasi dan fasilitas bidang keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86,44%	100%	100%	100%	86,44%	100%	100,00%	100,00%
79	Persentase fasilitas penyelenggaraan kegiatan keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
80	Persentase fasilitas dan koordinasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial	100%	100%	100%	88,89%	100%	100%	100%	100%	100%	88,89%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
81	Persentase Fasilitas dan koordinasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
82	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%

RENSTRA SETDA 2025-2029

83	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		9 Dok.	9 Dok	9 Dok	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	8 Dok.	9 Dok.	9 Dok.	100%	89%	100,00%	100,00%
84	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	3 Dok.	4 Dok	4 Dok	100%	75,00%	100,00%	100,00%
85	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
86	Persentase Produk Hukum Daerah yang dibuat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
87	Jumlah Kasus/Perkara litigasi yg difasilitasi	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	100%	100%	100,00%	100,00%
88	Persentase Naskah PHD dan Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
89	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
90	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	3 Kasus	2 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	100%	100%	100,00%	100,00%
91	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	100,00%	100,00%	100,00%
92	Persentase Naska Kerjasama Lingkup dalam Negeri yang diimplementasikan	80%	95%	80%	100%	100%	86%	100%	95%	80%	100%	100%	86%	100%	100%	100,00%	100,00%
93	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan dalam daerah yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
94	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan luar negeri yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%

RENSTRA SETDA 2025-2029

95	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
96	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
97	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	100%	100%	100,00%	100,00%
98	Persentase Koordinasi administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan	94,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,44%	100%	100%	100%	106%	100%	100,00%	100,00%
99	Jumlah BUMD dalam kondisi baik	1 BUMD	3 BUMD	3 BUMD	3 BUMD	3 BUMD	3 BUMD	100%	3 BUMD	1 BUMD	2 BUMD	2 BUMD	3 BUMD	33%	67%	66,67%	100,00%
100	Persentase hasil koordinasi monitoring dan pembinaan pengembangan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
101	Persentase hasil monitoring dan evaluasi pengendalian perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2 Laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
102	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
103	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100%	100%	100,00%	100,00%
104	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
105	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok			1 Dok	1 Dok			100,00%	100,00%
106	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok			1 Dok	1 Dok			100,00%	100,00%
107	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan	91,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,83%	100%	100%	100%	91,83%	100%	100,00%	100,00%
108	Persentase evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah	91,83%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,83%	100%	100%	100%	91,83%	100%	100,00%	100,00%

RENSTRA SETDA 2025-2029

109	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok	1 Dok	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	100%	100%	100%	100,00%
110	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100%	100%	100%	100,00%
111	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Lap	1 Lap.	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap.	1 Lap	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	100%	100%	100%	100,00%
112	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penyedia barang dan jasa melalui bagian barang dan jasa	62,12%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62,12%	104%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
113	Persentase kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan PBJ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
114	Persentase OPD yang melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
115	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	155 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
116	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	248 Dok	155 Dok	255 Dok	150 Dok	150 Dok	165 Dok	165 Dok	155 Dok	248 Dok	162 Dok	416 Dok	165 Dok	97,25%	108%	277,33%	100,00%
117	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	44 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
118	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		80 Orang		80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	0	0	80 Orang	0%	0%	0,00%	
119	Persentase koordinasi dan fasilitasi kebijakan bidang urusan sumber daya alam yang diimplementasikan	80%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
120	Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
121	Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan bidang pertambangan dan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
122	Persentase koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan bidang energi dan air	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
123	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 DOK	1 DOK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 DOK	1 DOK	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%

RENSTRA SETDA 2025-2029

124	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%
125	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 DOK	1 DOK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 DOK	1 DOK	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok	100%	100%	100,00%	100,00%

RENSTRA SETDA 2025-2029

**Evaluasi Anggaran Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan : 2021-2026**

RENSTRA SETDA 2025-2029

No	Program /Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2021-2026				Realisasi Anggaran Tahun 2021-2026				Rasio Capaian Anggaran 2021-2026			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	Sekretariat Daerah	71.291.030.889	74.103.856.742	68.453.697.293	71.788.641.580	56.758.543.838	64.627.867.202	60.551.436.148	66.271.491.176	79,62%	87,21%	88,46%	92,31%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	51.902.742.673	54.354.756.511	49.143.281.527	52.006.051.280	39.672.688.068	48.028.041.585	43.215.246.906	48.218.262.944	76,44%	88,36%	87,94%	92,72%
1.	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.795.000	148.860.600	340.847.300	405.125.600	79.575.500	132.084.400	320.816.800	359.415.200	89,62%	88,73%	94,12%	88,72%
	1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.795.000	148.860.600	217.895.400	121.195.200	79.575.500	132.084.400	205.368.600	104.541.200	89,62%	88,73%	94,25%	86,26%
	1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	-	-	8.870.900	164.510.400	-	-	8.822.900	156.972.000	0,00%	0,00%	99,46%	95,42%
	1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	9.976.100	12.650.000	-	-	9.935.300	6.386.400	0,00%	0,00%	99,59%	50,49%
	1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	90.610.000	87.800.000	-	-	85.500.000	78.000.000	0,00%	0,00%	94,36%	88,84%
	1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13.494.900	18.970.000	-	-	11.190.000	13.515.600	0,00%	0,00%	82,92%	71,25%
1.	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.665.096.761	17.736.463.000	16.976.733.232	17.456.004.810	15.813.832.546	16.099.503.224	16.160.414.369	16.509.053.819	76,52%	90,77%	95,19%	94,58%
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.573.191.761	16.470.193.000	15.801.210.332	16.321.371.810	14.784.062.546	14.903.196.724	15.016.903.169	15.414.650.819	75,53%	90,49%	95,04%	94,44%
	2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	976.905.000	1.060.920.000	1.025.504.900	963.235.000	924.320.000	1.026.629.500	1.005.816.500	935.903.000	94,62%	96,77%	98,08%	97,16%

RENSTRA SETDA 2025-2029

2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.325.000	136.550.000	118.970.000	140.350.000	57.325.000	117.447.000	111.694.800	133.500.000	90,53%	86,01%	93,88%	95,12%
2.3	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	51.675.000	68.800.000	31.048.000	31.048.000	48.125.000	52.230.000	25.999.900	25.000.000	93,13%	75,92%	83,74%	80,52%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.890.268.000	8.845.768.750	9.248.668.800	8.000.784.450	4.588.568.596	7.626.585.052	7.831.205.572	7.582.447.331	66,59%	86,22%	84,67%	94,77%
3.1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	6.890.268.000	8.845.768.750	9.248.668.800	8.000.784.450	4.588.568.596	7.626.585.052	7.831.205.572	7.582.447.331	66,59%	86,22%	84,67%	94,77%
4.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	87.425.000	123.750.000	101.006.000	106.806.000	46.875.000	102.046.000	97.930.600	99.062.000	53,62%	82,46%	96,96%	92,75%
4.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	87.425.000	123.750.000	101.006.000	106.806.000	46.875.000	102.046.000	97.930.600	99.062.000	53,62%	82,46%	96,96%	92,75%
5	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	1.062.207.900	1.067.651.894	744.100.085	761.749.700	590.286.174	581.838.461	671.171.020	661.100.522	55,57%	54,50%	90,20%	86,79%
5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.062.207.900	1.067.651.894	225.682.840	249.549.700	590.286.174	581.838.461	175.011.020	175.020.522	55,57%	54,50%	77,55%	70,13%
5.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	55.640.000	72.200.000	-	-	54.760.000	61.480.000	0,00%	0,00%	98,42%	85,15%
5.3	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	462.777.245	440.000.000	-	-	441.400.000	424.600.000	0,00%	0,00%	95,38%	96,50%
1. 6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	605.918.800	599.151.800	423.654.100	606.875.000	469.410.805	426.833.350	410.943.000	576.537.000	92,71%	71,24%	97,00%	95,00%
6.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	353.518.800	489.131.800	415.487.100	606.875.000	327.734.000	384.021.000	402.983.000	576.537.000	92,71%	78,51%	96,99%	95,00%
6.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	252.400.000	110.020.000	8.167.000	-	141.676.805	42.812.350	7.960.000	-	56,13%	38,91%	97,47%	0,00%

RENSTRA SETDA 2025-2029

1.	7	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.271.123.944	5.258.242.975	4.295.042.060	5.127.939.120	4.331.470.105	4.416.017.300	3.679.468.750	4.855.995.160	82,17%	83,98%	85,67%	94,70%
	7.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	259.856.864	302.563.865	434.662.000	482.599.000	239.638.850	209.382.750	362.564.000	479.562.800	92,22%	69,20%	83,41%	99,37%
	7.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	438.890.338	497.285.257	936.634.000	1.333.791.780	426.005.000	482.692.400	877.360.400	1.281.023.300	97,06%	97,07%	93,67%	96,04%
	7.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.714.127.267	1.026.177.119	787.264.160	1.429.326.140	1.664.484.177	992.315.680	746.705.000	1.412.469.060	97,10%	96,70%	94,85%	98,82%
	7.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.792.240.220	3.376.505.519	603.905.800	1.161.401.600	1.937.718.078	2.679.716.120	464.925.350	987.725.000	69,40%	79,36%	76,99%	85,05%
	7.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.009.255	55.711.215	165.075.900	200.045.600	63.624.000	51.910.350	163.210.000	188.883.000	96,39%	93,18%	98,87%	94,42%
	7.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	1.367.500.200	520.775.000	-	-	1.064.704.000	506.332.000	0,00%	0,00%	77,86%	97,23%
1.	8	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.666.978.594	8.807.607.859	2.508.487.750	4.982.727.900	4.297.762.997	8.719.224.475	2.356.469.200	4.913.865.000	92,09%	99,00%	93,94%	98,62%
	8.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	5.068.244.799	129.675.000	2.944.590.000	4.297.762.997	5.057.126.000	126.400.000	2.887.755.000	0,00%	99,78%	97,47%	98,07%
	8.2	Pengadaan Mebel	-	-	862.253.000	328.497.000	-	-	784.000.000	321.856.000	0,00%	0,00%	0,00%	97,98%
	8.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.666.978.594	3.739.363.060	1.516.559.750	1.709.640.900	-	3.662.098.475	1.446.069.200	1.704.254.000	0,00%	97,93%	95,35%	99,68%
1.	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.596.005.523	3.364.460.674	4.633.317.800	4.155.850.800	2.788.596.669	2.611.474.603	4.106.438.682	4.079.402.151	60,67%	77,62%	88,63%	98,16%
	9.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	463.425.000	447.025.000	496.341.800	500.411.000	388.581.000	421.550.000	475.860.300	482.607.500	83,85%	94,30%	95,87%	96,44%
	9.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.840.500.000	1.947.500.000	2.033.549.000	1.751.760.000	1.184.235.241	1.264.125.003	1.614.657.857	1.736.600.151	64,34%	64,91%	79,40%	99,13%
	9.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.654.615.000	336.725.000	397.009.000	476.300.000	581.240.000	311.745.000	396.940.000	440.000.000	35,13%	92,58%	99,98%	92,38%

RENSTRA SETDA 2025-2029

9.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	637.465.523	633.210.674	1.706.418.000	1.427.379.800	634.540.428	614.054.600	1.618.980.525	1.420.194.500	99,54%	96,97%	94,88%	99,50%
1. 10	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.304.977.000	5.016.528.750	5.189.414.900	5.119.221.500	4.093.726.520	4.018.837.720	3.306.920.963	3.879.029.860	77,17%	80,11%	63,72%	75,77%
10.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.682.669.000	2.849.099.000	3.595.369.000	3.421.117.500	1.858.686.679	2.285.884.195	2.015.396.511	2.298.448.204	69,28%	80,23%	56,06%	67,18%
10.2	Pemeliharaan Mebel	-	-	20.600.000	14.500.000	-	-	14.300.000	14.450.000	0,00%	0,00%	69,42%	99,66%
10.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	747.511.800	864.585.000	591.845.900	705.340.000	486.225.500	534.386.300	406.240.500	652.134.000	65,05%	61,81%	68,64%	92,46%
10.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.874.796.200	1.302.844.750	981.600.000	978.264.000	1.748.814.341	1.198.567.225	870.983.952	913.997.656	93,28%	92,00%	88,73%	93,43%
1. 11	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	0%	-	2.083.139.400	2.579.450.400	0%	-	1.732.649.700	2.172.787.040	0,00%	0,00%	83,17%	84,23%
11.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	0		1.212.165.400	1.665.870.200	0		968.466.700	1.396.541.240	0,00%	0,00%	79,90%	83,83%
11.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0		755.384.000	589.908.100	0		669.351.700	526.120.000	0,00%	0,00%	88,61%	89,19%
11.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	0		115.590.000	323.672.100	0		94.831.300	250.125.800	0,00%	0,00%	82,04%	77,28%
1. 12	Kegiatan Penataan Organisasi	403.997.473	507.333.473	466.096.800	391.950.800	317.109.256	460.201.700	430.896.450	358.758.661	78,49%	90,71%	92,45%	91,53%
12.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	112.871.156	90.094.507	81.644.300	71.519.600	89.864.000	83.749.300	73.604.800	64.580.000	79,62%	92,96%	90,15%	90,30%
12.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	124.995.606	145.234.507	144.984.300	157.240.000	92.898.706	136.550.400		149.163.661	74,32%	94,02%	94,16%	94,86%
12.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	166.130.711	272.004.459	239.468.200	163.191.200	134.346.550	239.902.000	220.779.250	145.015.000	80,87%	88,20%	92,20%	88,86%

RENSTRA SETDA 2025-2029

1.	13	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.259.948.678	2.878.936.736	2.132.773.300	2.311.565.200	2.255.473.900	2.833.395.300	2.109.921.800	2.170.809.200	99,80%	98,42%	98,93%	93,91%
	13.1	Fasilitasi Keprotokolan	188.519.800	374.419.800	256.165.500	318.043.000	185.519.800	374.219.800	255.965.500	275.793.000	98,41%	99,95%	99,92%	86,72%
	13.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	465.923.000	544.500.000	544.670.000	507.461.000	465.154.500	527.115.500	522.618.500	426.755.000	99,84%	96,81%	95,95%	84,10%
	13.3	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	1.605.505.878	1.960.016.936	1.331.937.800	1.486.061.200	1.604.799.600	1.932.060.000	1.331.337.800	1.468.261.200	99,96%	98,57%	99,95%	98,80%
2		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	10.579.238.530	14.162.927.831	13.691.451.866	13.697.583.100	9.119.415.472	11.173.229.167	12.080.492.125	12.112.693.232	86,20%	78,89%	88,23%	88,43%
2.	1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	662.687.910	702.221.375	386.109.580	338.838.000	492.754.235	602.238.915	281.581.920	271.818.600	74,36%	85,76%	72,93%	80,22%
	1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	369.479.795	380.989.880	192.408.100	203.175.800	302.578.200	349.499.500	160.718.100	169.488.800	81,89%	91,73%	83,53%	83,42%
	1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	129.711.400	159.261.300	63.741.300	75.099.800	94.901.400	111.831.300	29.100.000	59.599.800	73,16%	70,22%	45,65%	79,36%
	1.3	Fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah	163.496.715	161.970.195	129.960.180	60.562.400	95.274.635	140.908.115	91.763.820	42.730.000	58,27%	87,00%	70,61%	70,56%
2		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat	8.339.359.383	11.897.805.504	11.338.298.786	11.376.454.700	7.186.648.268	9.120.551.077	9.912.591.569	9.935.250.002	86,18%	76,66%	87,43%	87,33%
	2.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.590.003.635	8.353.506.328	8.245.846.100	8.046.970.850	6.515.806.068	6.449.301.354	6.999.610.424	6.784.768.404	85,85%	77,20%	84,89%	84,31%
	2.2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	718.213.300	3.407.695.726	2.909.152.686	3.178.733.850	652.623.300	2.549.814.723	2.738.731.145	3.007.181.598	90,87%	74,83%	94,14%	94,60%
	2.3	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	31.142.448	136.603.450	183.300.000	150.750.000	18.218.900	121.435.000	174.250.000	143.300.000	58,50%	88,90%	95,06%	95,06%
3		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.006.597.269	934.301.175	1.267.791.500	1.418.770.800	990.564.269	922.166.175	1.263.682.500	1.414.649.200	98,41%	98,70%	99,68%	99,71%

RENSTRA SETDA 2025-2029

3.1	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	488.814.271	400.876.460	327.073.000	371.840.800	488.814.271	400.876.460	325.641.000	368.080.000	100,00%	100,00%	99,56%	98,99%
3.2	Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum	242.638.000	276.398.795	331.272.000	442.368.600	226.605.000	264.263.795	331.272.000	442.368.600	93,39%	95,61%	100,00%	100,00%
3.3	Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	275.144.998	257.025.920	609.446.500	604.561.400	275.144.998	257.025.920	606.769.500	604.200.600	100,00%	100,00%	99,56%	99,94%
4	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	570.593.968	628.599.777	699.252.000	563.519.600	449.448.700	528.273.000	622.636.136	490.975.430	78,77%	84,04%	89,04%	87,13%
4.1	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	317.892.065	274.973.399	406.369.600	380.635.600	259.234.300	261.477.500	379.764.884	358.822.430	81,55%	95,09%	93,45%	94,27%
4.2	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	146.232.203	206.088.339	170.897.200	122.411.000	105.644.700	131.307.900	126.437.312	81.203.000	72,24%	63,71%	73,98%	66,34%
4.3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	106.469.700	147.538.039	121.985.200	60.473.000	84.569.700	135.487.600	116.433.940	50.950.000	79,43%	91,83%	95,45%	84,25%
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	8.809.049.686	5.586.172.400	5.618.963.900	6.085.007.200	7.966.440.298	5.426.596.450	5.255.697.117	5.940.535.000	90,43%	97,14%	93,53%	97,63%
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	7.277.477.298	4.346.529.000	4.392.957.000	4.806.085.200	7.219.877.298	4.299.038.000	4.169.455.017	4.756.900.000	99,21%	98,91%	94,91%	98,98%
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	7.138.436.500	4.085.489.000	4.005.921.000	4.530.562.800	7.110.951.500	4.078.894.000	3.789.239.017	4.493.632.800	99,61%	99,84%	94,59%	99,18%
1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	67.357.848	150.000.000	93.155.000	198.654.600	49.367.848	124.865.000	91.955.000	189.768.400	73,29%	83,24%	98,71%	95,53%
1.3	Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	71.682.950	111.040.000	154.301.000	73.857.000	59.557.950	95.279.000	151.701.000	70.488.000	83,09%	85,81%	98,31%	95,44%
1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD			26.290.000	2.002.400			25.970.000	2.002.400	0,00%	0,00%	98,78%	100,00%
1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-	-	113.290.000	1.008.400		-	110.590.000	1.008.400	0,00%	0,00%	97,62%	100,00%
2	Kegiatan Administrasi Pembangunan	305.663.400	301.438.200	279.867.200	188.690.000	252.818.400	254.907.750	231.854.200	171.285.000	82,71%	84,56%	82,84%	90,78%

RENSTRA SETDA 2025-2029

2.1	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	124.350.000	121.935.000	123.025.000	18.875.000	107.175.000	107.925.000	90.400.000	11.275.000	86,19%	88,51%	73,48%	59,74%
2.2	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	36.313.400	24.989.800	6.763.000	18.909.000	15.343.400	15.989.750	2.725.000	13.315.000	42,25%	63,99%	40,29%	70,42%
2.3	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	145.000.000	154.513.400	150.079.200	150.906.000	130.300.000	130.993.000	138.729.200	146.695.000	89,86%	84,78%	92,44%	97,21%
3	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	587.150.288	499.446.500	507.381.000	726.091.000	427.620.000	465.636.500	480.295.000	685.750.000	72,83%	93,23%	94,66%	94,44%
3.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	191.450.000	169.500.000	138.626.000	136.188.000	137.400.000	154.800.000	132.735.000	134.720.000	71,77%	91,33%	95,75%	98,92%
3.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	325.700.000	329.946.500	343.541.000	568.468.000	290.220.000	310.836.500	338.310.000	538.200.000	89,11%	94,21%	98,48%	94,68%
3.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	70.000.288	-	25.214.000	21.435.000	-	-	9.250.000	12.830.000	0,00%	0,00%	36,69%	59,86%
4	Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	638.758.700	438.758.700	438.758.700	364.141.000	66.124.600	407.014.200	374.092.900	326.600.000	10,35%	92,76%	85,26%	89,69%
4.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	85.739.600	102.575.000	235.500.000	83.020.000	66.124.600	86.410.000	219.759.600	79.040.000	77,12%	84,24%	93,32%	95,21%
4.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	485.416.600	252.663.700	121.200.000	129.880.000		244.554.200	90.769.600	102.460.000	0,00%	96,79%	74,89%	78,89%
4.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	67.602.500	83.520.000	82.058.700	151.241.000		76.050.000	63.563.700	145.100.000	0,00%	91,06%	77,46%	95,94%

Evaluasi pelaksanaan anggaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2024 merupakan proses untuk menilai sejauh mana alokasi dan pemanfaatan anggaran mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan dalam renstra.

Berdasarkan Tabel Evaluasi Pelaksanaan anggaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2024 dapat gambarkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik, akan tetapi masih perlu peningkatan terutama dalam sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, hal ini dimaksudkan agar proses penyelarasan antara rencana pembangunan dengan alokasi sumber daya keuangan program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan tujuan :

1. Menjamin keterpeaduan antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dengan alokasi anggaran.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi penggunaan anggaran.
3. Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional/daerah.

Dari tabel tersebut diatas, juga dapat dijelaskan bahwa realisasi atau persentase serapan anggaran terhadap pagu yang ditetapkan setiap tahun.

Keselarasan antara perencanaan dan penganggaran adalah kunci tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Ketidak sesuaian antara keduanya akan mengakibatkan pemborosan anggaran dan kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan.

2.1.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik belum mencapai titik akhir, masih banyak yang perlu diatur, dilaksanakan dan dikendalikan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan di setiap level pemerintahan, mulai pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Sebagai perumus kebijakan pada level kabupaten, fungsi Sekretariat Daerah sangat vital dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawalan setiap pembentukan regulasi dan implementasi, melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan akan berbagai regulasi yang dapat membantu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, kedalam berbagai macam kebijakan secara legal formal dalam bentuk peraturan hukum daerah (Peraturan Daerah) dan kebijakan Kepala Daerah seperti Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Selain menjalankan fungsi penataan regulasi, Sekretariat Daerah juga memiliki peran yang besar dalam rangka fasilitasi, koordinasi dan pemantauan lintas SKPD atas semua pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang berlokus dan berdampak di wilayah kabupaten. Peran sentra yang dijalankan Sekretariat Daerah dalam hal ini secara institusional, dituntut memiliki kemampuan untuk menyerap, memahami dan mengkomunikasi berbagai kebijakan dari atas untuk diterapkan di tingkat kabupaten.

Lingkungan strategis yang berpengaruh terdiri dari Analisis lingkungan Internal (ALI) terhadap aspek kekuatan (*Strength*) dan aspek kelemahan (*Weakness*) dan analisis lingkungan Eksternal (ALE) terhadap aspek Peluang (*Opportunity*) dan aspek hambatan/ ancaman (*Threat*).

Beberapa faktor kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipandang dari sudut Analisis SWOT, dapat dikemukakan sebagai berikut :

A. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), merupakan potensi yang terkandung dalam tubuh organisasi/ satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Secara rinci faktor internal terdiri dari :

- 1) Kekuatan (*Strength*) ;
 - a. Adanya komitmen pimpinan dan staf yang cukup besar dalam pelaksanaan tupoksi;
 - b. Tersedianya sumber daya Manusia dalam jumlah yang cukup;
 - c. Adanya kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup;
 - e. Kemampuan dan kemauan aparatur jajaran Sekretariat Daerah yang cukup tinggi untuk belajar.
- 2) Kelemahan (*Weakness*) ;
 - a. Motivasi kerja aparatur masih belum merata;
 - b. Data pendukung yang valid dan akurat kurang terinventarisir dengan baik;
 - c. Kemampuan dan keterampilan aparatur masih kurang dan belum merata;
 - d. Kurangnya kemauan untuk berkompetisi dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Kurangnya koordinasi dalam mendukung mekanisme teamwork.

B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari Peluang (*Opportunity*) dan Hambatan/Ancaman (*Threat*), merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian sungguh-sungguh dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara rinci faktor eksternal terdiri dari :

- 1) Peluang (*Opportunity*) ;

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan berupa :

 - 1) Adanya keinginan kuat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - 2) Perkembangan teknologi informasi untuk menunjang e government;

- 3) Adanya peraturan perundang-undangan (UU, PP, Keppres, Kepmen) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Adanya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan;
 - 5) Adanya peran serta dan dukungan swasta dan masyarakat yang cukup tinggi;
 - 6) Semakin kokoh dan meluasnya kebijakan otonomi daerah dan demokratisasi;
- 2) Hambatan/Tantangan (*Threat*) ;
- Disamping peluang dalam proses pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedepan juga akan menghadapi berbagai hambatan, tantangan dan anacaman yang tidak mudah. Hambatan atau tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan menyangkut :
- 1) Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal keterlibatan dalam perumusan kebijakan yang masih rendah;
 - 2) Penerapan e-government belum terintegrasi dan belum maksimal;
 - 3) Inefisiensi penggunaan anggaran;
 - 4) Inovasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum dilakukan secara optimal;
 - 5) Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan;
 - 6) Rendahnya Kompetensi ASN, mindset dan culture set birokrasi yang kurang baik;
 - 7) Akuntabilitas Kinerja masih rendah.
 - 8) Terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
 - 9) Belum optimal mekanisme perencanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

- 10) Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan cepat;
- 11) Kurangnya pemerataan kesempatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka disimpulkan isu-isu strategis dalam unsur internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu Tahun 2025-2029.

2.2.1 Indikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung maupun faktor penghambat, yang memungkinkan tercapai atau tidaknya kinerja secara optimal. Dalam pembahasan sub bab ini akan lebih berfokus pada analisis faktor penghambat kinerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan fungsi sebagai perumus kebijakan dapat diidentifikasi permasalahan pada Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum membudaya;
4. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi reformasi;
5. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih perlu ditingkatkan;
6. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada SKPD pelayanan termasuk Kecamatan, yang meliputi unsur kepatuhan terhadap standar pelayanan, inovasi dalam pelayanan dan penegakan reward/punishment terhadap pemberi layanan, yang semuanya bermuara pada hasil survey kepuasan;
7. Masih rendahnya kapasitas aparatur tingkat kecamatan terutama dalam hal Standar Pelayanan
8. Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi implementasi produk hukum daerah
10. Belum optimalnya capaian realisasi fisik dan keuangan kegiatan dalam menunjang kinerja pembangunan.
11. Masih rendahnya pemahaman dan minimnya komitmen aparatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
12. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
13. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
14. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih terbatasnya pemahaman aparatur sipil negara terhadap tupoksi, beban kerja dan analisis jabatan di lingkup Sekretariat Daerah sehingga belum seluruhnya aparat memenuhi tuntutan kinerja yang diharapkan;
3. Adanya tuntutan akurasi dan tertibnya pengelolaan data di masing-masing bagian terhadap hasil kinerja organisasi;
4. Belum adanya SOP pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah;
5. Terbatasnya SDM sebagai korektor produk hukum daerah pada bagian Hukum;
6. Belum optimalnya Bagian dalam menjalankan fungsi perumusan kebijakan daerah dan koordinator bagi SKPD yang berada pada lingkup tugasnya;
7. Komposisi penempatan sumberdaya aparatur pada bagian / unit kerja kurang merata;
8. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kinerja aparatur;
9. Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
10. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja/bagian belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 2025 – 2029, adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain- lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

d. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang “ramping struktur, kaya fungsi”. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada lima tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2025-2045). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah adalah untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata dan Berkelanjutan (Visi RPJPD 2025-245). Visi tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahap I ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Sejahtera, Merata dan Berkelanjutan (Visi RPJPD 2025-245) dengan target hingga akhir periode 2029/2030 sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) mencapai 5 persen
2. Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,78
3. Angka Kemiskinan Menurun hingga 8 persen
4. Indeks Gini menurun hingga 0,287

Dengan memperhatikan perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

A. Visi

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2025–2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025–2045 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (Lima) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025–2029 yaitu

“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI” *(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis, Mandiri dan Ber-Inovasi).*

- 1) **Berkualitas** : Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing merupakan pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang “Berkah Madani”. SDM yang unggul akan menjadi penggerak utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital dan persaingan global;
- 2) **Ekonomi Maju** : Pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan merupakan landasan utama dalam pencapaian visi Berkah Madani Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melalui pilar Ekonomi Maju, pemerintah daerah menitikberatkan pada strategi peningkatan produktivitas sektor unggulan, penguatan daya saing daerah, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- 3) **Religius** : Nilai-nilai religius menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang berintegritas, bermoral, dan harmonis. Pilar Religius dalam visi Berkah Madani menegaskan komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membangun karakter masyarakat dan aparatur yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, serta menjadikan toleransi antarumat beragama sebagai kekuatan sosial dalam menjaga persatuan dan kedamaian;

- 4) **Kompetitif** : Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan produk unggulan yang berbasis potensi lokal. Pilar Kompetitif dalam visi Berkah Madani mencerminkan upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan akses pasar produk-produk daerah agar mampu bersaing di tingkat regional, nasional, bahkan internasional;
- 5) **Aman dan Harmonis** : Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam visi *Berkah Madani*, pilar *Aman dan Harmonis* diarahkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang stabil, damai, serta menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat;
- 6) **Mandiri** : Kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola potensi sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan eksternal. Dalam visi *Berkah Madani*, pilar *Mandiri* menekankan pada upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mampu berdiri di atas kekuatan sendiri, baik secara fiskal, ekonomi, maupun social;
- 7) **Inovatif** : Inovasi merupakan pilar penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan. Dalam visi Berkah Madani, unsur Inovatif diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan ekosistem pembangunan yang responsif terhadap perubahan, berbasis pada kreativitas, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.

B. Misi

Untuk mencapai dan mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 (Lima) Tahun kedepan dirumuskan dan ditetapkan 3 (Tiga) Misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tentram, tertib, mantap dan inovatif;
2. Berkah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;

3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pemabangunan dari desa ke kota yang berkelanjutan;

**Visi dan Misi, Sasaran, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode 2025-2029**

Misi KDH/WKDH	Sasaran	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Misi ke- I Berkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, mantap dan inovatif	- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan - Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta investasi - Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik praktik inovasi yang baik secara kontinu	- Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi masyarakat - Pendidikan yang berkualitas dan merata -Perlindungan Sosial dan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan -Ketentraman dan ketertiban daerah tangguh -Beragama maslahat dan berkebudayaan maju -Keluarga berkualitas, Kesenjangan gender, dan masyarakat inklusif	- Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air -Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan -Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) - Peningkatan layanan literasi melalui digitalisasi perpustakaan - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial - Penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat - Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia produktif

			- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah - Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi - Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan - Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah) - Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern - Penguatan dan pengembangan kurikulum ' - pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) - Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik - Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan - Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan - Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan - Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan
--	--	--	--

			- Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) - Mendorong penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global - Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills - Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling - Penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital) - Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi - Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan - Mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja - Percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas
--	--	--	--

			- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien - Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi - Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga - Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah - penataan kawasan kumuh perkotaan - Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas - Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila - Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan - Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang - Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan - Penetapan upah kabupaten berbasis produktivitas dan berkeadilan - Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
--	--	--	--

Misi Ke-2 Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	- Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif - Digitalisasi diberbagai sektor	- Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital E50 - Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah - Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan - Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat - Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah - Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah - Pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital - Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja - Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat - Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat - Penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan - Terwujudnya integrasi data kependudukan
---	--	---	--

Misi Ke-3 Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan	- Meningkatnya produktivitas ekonomi kabupaten dan hilirisasi industri berbasis SDA - Meningkatnya ketangguhan sosial budaya dan ekologi - Menurunnya ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan pendapatan	- Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi - Penerapan ekonomi hijau daerah - Konektivitas ekonomi domestik dengan daerah luar	- Penguatan integritas partai politik - Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional - optimaliasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah - Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance - Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah - Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional - Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko - Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) - Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas - Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
--	--	---	---

		- Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi - Stabilitas ekonomi daerah - Lingkungan hidup berkualitas - Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan - Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim - Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas - Pemerataan pembangunan - Pelabuhan pengumpan dan pelabuhan lainnya dengan kapasitas memadai - Jaringan transportasi darat dan laut terintegrasi	- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis - Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian - Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna - Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian - Penerapan dan Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah - Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak - Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan - Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan
--	--	--	---

			- Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif - Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan - Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya - Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan - Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: - Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya - Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja - Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan
--	--	--	--

			- Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan - Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan - Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan - Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan - City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan - Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif - Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha - Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif - Peningkatan partisipasi, prestasi, dan pengelolaan keolahragaan
--	--	--	--

			- Penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga - Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi - Penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan - Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis - Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa - Memanfaatkan keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik - Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global - Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya - Penerapan ekonomi hijau dan biru - Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon - Mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya - Penyediaan angkutan massal - Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas
--	--	--	--

			- Penerapan Teknologi Tepat Guna - Penguatan infrastruktur teknologi - Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi - Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif - Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis - Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM - Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif - Peningkatan produktivitas BUMD - Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal - Hilirisasi sumberdaya alam unggulan - Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri - Penguatan ekosistem Industrialisasi - Penguatan pengendalian inflasi daerah
--	--	--	---

			- Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis - Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami - Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi - Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air - Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy - Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah - Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.) - Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir
--	--	--	---

			- Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan - Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik - Peningkatan sarana prasarana perhubungan - Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri - Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
--	--	--	--

C. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih secara teknis operasional terjabarkan pada tujuan, sasaran, program dan kegiatan prioritas terpilih atas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pemuda
2. Peningkatan Kualitas dan Konsistensi Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
4. Peningkatan Kinerja Perencanaan dan Penganggaran
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
6. Pemberdayaan ekonomi Kerakyatan
7. Pemerataan Pembangunan dari Desa ke kota
8. Ekonomi kreatif dan kepemudaan
9. Peningkatan pariwisata
10. Peningkatan kualitas dan pelayanan air bersih
11. Konektivitas antar desa/kecamatan/kabupaten
12. Penerunan emisi gas rumah kaca

D. Tujuan Pembangunan Daerah

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi adalah misi yang menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah untuk mencapai visi. Berangkat dari Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas SDM menjadi prioritas strategis dalam mendukung daya saing daerah, mempercepat pengentasan kemiskinan, serta mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Peningkatan kualitas SDM ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan produktivitas kerja.

2. Mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif dan memiliki daya tahan sosial.

Kondisi masyarakat yang tenteram, tertib, inovatif, dan memiliki daya tahan sosial merupakan prasyarat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan ini mencerminkan orientasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam membangun tatanan sosial yang damai, harmonis, responsif terhadap perubahan, serta tangguh menghadapi berbagai tantangan sosial maupun bencana.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan landasan utama bagi penyelenggaraan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif menjadi penopang utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Integritas dalam pelayanan mencerminkan profesionalisme dan komitmen aparatur

negara dalam memberikan layanan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, adaptivitas mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, serta tantangan eksternal seperti perubahan iklim, pandemi, dan perkembangan digital.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta daya saing daerah. Pemerintah daerah menciptakan kebijakan yang inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memastikan bahwa seluruh wilayah, baik desa maupun kota, memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan. Tujuan ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya, infrastruktur, pelayanan publik, dan peluang ekonomi yang merata, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesinambungan antar generasi.

Berdasarkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat dan Tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Sekretariat Daerah Mengacu Kepada Misi Ke 2 yaitu ***Berkah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik***

2.2.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Mengingat salah satu tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam pelaksanaan seluruh urusan bidang pemerintahan dan pembangunan yang mencakup pemerintahan umum, organisasi, kesejahteraan rakyat, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, fasilitasi hukum, Kerjasama, Perencanaan dan Keuangan, kegiatan perekonomian dan pembangunan, pelayanan

pengadaan barang dan jasa dan pelayanan umum, maka terkait dengan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Strategis Provinsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai program dan kegiatan Kementerian dan Pemerintah Provinsi yang berfokus dan berlokus di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara teknis kinerja Sekretariat Daerah tidak terkait langsung dengan penerapan dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan dokumen KLHAS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Pemerintah Daerah, namun demikian secara substantive berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah sangat berperan dalam mengendalikan, memantau dan melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan terkait penataan ruang dan lingkungan hidup yang tertuang dalam RTRW dan KLHAS dalam rangka merumuskan kebijakan-kebijakan strategis lanjutan.

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Adapun maksud dari penataan ruang kabupaten yaitu :

1. Terwujudnya rencana tata ruang Wilayah yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
2. Terwujudnya rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang;
4. Memberikan rangsangan partisipasi masyarakat (Investor) untuk melaksanakan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan

yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;

6. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di Daerah.

RTRWK berfungsi sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. penataan ruang kawasan strategis kota.

Strategi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi :

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
2. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di Daerah;

3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
5. Penatagunaan tanah.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. kebijakan dan strategi struktur ruang;
2. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
3. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kabupaten terdiri atas:

1. Terwujudnya rencana tata ruang Wilayah yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
2. Terwujudnya rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang;
4. Memberikan rangsangan partisipasi masyarakat (Investor) untuk melaksanakan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
6. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

2.2.5 Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2025 – 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;

3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal;
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat;
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat;

Selain isu-isu tersebut diatas, masih banyak permasalahan-permasalahan daerah yang perlu diselesaikan melalui perumusan kebijakan yang tepat, diantaranya yaitu terkait dengan penanganan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, infrastruktur dan lain-lain urusan yang menjadi tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Secara umum dilihat dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf yang membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif. Maka misi 2 Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029 yang berbunyi ***“Berkah dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik”*** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku perangkat daerah.

Sebagai upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan 1 (Satu) tujuan jangka menengah dalam Rencana Strategis 2025-2029 yaitu ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab”***. Upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan layanan kepada masyarakat dengan standar yang lebih baik, cepat, transparan serta sesuai dengan aturan.

1. **Efektif** : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan berupaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan selagi daya yang dimiliki.

2. **Efisien** : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan memberikan pelayanan dengan penggunaan sumber daya yang hemat tanpa mengurangi kualitas.
3. **Akuntabel** : dalam memberikan pelayanan, semua proses pelayanan dapat secara transparan, baik secara hukum maupun kepada masyarakat.
4. **Bertanggung jawab** : Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya memberi layanan, tetapi juga memastikan layanan tersebut adil, sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.

3.2. Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 terbagi menjadi 3 (tiga) sasaran sesuai dengan Tugas dan Fungsi, Tujuan, Program dan kegiatan Sekretaris Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu sebanyak 3 (tiga) Program. Masing-masing program dilaksanakan oleh 4 (Empat). Masing-masing bagian merupakan koordinator dan

fasilitasi dari pelaksanaan tugas beberapa OPD, kecuali Bagian Umum dan Bagian Perencanaan dan Keuangan. Namun perlu diketahui bahwa selain berperan sebagai Koordinator dan Fasilitasi, Bagian-Bagian di Sekretariat Daerah juga memiliki kegiatan-kegiatan rutin yang menjadi target kinerja masing-masing Bagian. Adapun Sasaran Strategis dan indikator dari target kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat jangka menengah 2025-2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.
2. Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga
3. Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

Tabel 3.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah 2025-2029
Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	1. Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah 2. Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu 3. Persentase realisasi anggaran belanja sekretariat daerah terhadap total pagu 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sekretariat daerah 5. Nilai Kematangan Perangkat Daerah 6. Jumlah Perangkat Daerah dengan mutu pelayanan minimal baik (B) 7. Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B) 8. Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan

2.	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	1. Nilai / Skor LPPD 2. Persentase bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan Sosial yang tersalurkan tepat sasaran 3. Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi 4. Indeks Reformasi Hukum 5. Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan 6. Persentase Naskah MOU yang difasilitasi
3.	Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	1. Persentase Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sektor ekonomi 2. Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik 3. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu 4. Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90% 5. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE 6. Persentase Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Secara detil Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Sasaran yang disertai target kinerja dari awal rencana strategis sampai dengan kondisi akhir Rencana Strategis Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah dan Indikator Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

VISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI				Misi Ke 2							
MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT “BERKAH MADANI” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis Mandiri dan ber-Inovasi)				Berkah dalam Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT											
1. Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas Kinerja dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif dan efisien	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (*)	77,19	80,01	82,10	83,00	84,50	85,10	85,10	
			Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu (%)	92	93	94	95	96	97	98	
			Persentase realisasi anggaran belanja sekretariat daerah terhadap total pagu (%)	92,31	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	94,50	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,34	86	86,5	87,5	88	88,3	88,3	
			Nilai Kematangan Perangkat Daerah (*)	35	36	37	38	39	40	40	
			Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu pelayanan Minimal baik (B) (*)	40	40	43	44	44	44	44	
			Jumlah AKIP Perangkat Daerah berpredikat Minimal baik (B) (*)	34	34	35	36	37	38	38	

			Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (*)	0	80	85	87	88	88,3	88,3	
		Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik (*)	1	1	1	2	2	3	3	
			Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu (%)	75	75	80	83	85	97	97	
			Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90% (*)	27	30	32	33	35	37	37	
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Nilai/Skor LPPD (Angka)	2,64 (Sedang)	3,0 (Sedang)	3,2 (Sedang)	3,4 (Sedang)	3,46 (Tinggi)	3,5 (Tinggi)	3,5 (Tinggi)	
			Indeks Reformasi Hukum	0	83	85	86	87	88	88	
			Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi (*)	3	2	2	1	1	1	1	
			Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			persentase Naskah MOU yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

3.3.1 Strategi Renstra Sekretariat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2025-2029.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam menacapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi selanjutnya dijabarkan dalam arah kebijakan sehingga strategi menjadi lebih spesifik, konkret dan operasional.

Tabel 3.3.1
Strategi Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI” (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis, Mandiri dan Ber-Inovasi)		
Misi 2 : Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	• Meningkatkan Kapentensi SDM • koordinasi, konsultasi terkait dokumen perencanaan dan keuangan lingkup sekretariat • Meningkatkan nilai dan capaian target Sakip Perangkat Daerah • Penyusunan pedoman pelaksanaan Sakip Perangkat Daerah • Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan keuangan • Menata standar pelayanan administrasi • Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait • Pembinaan tata naskah dinas • Pemanfaatan sarana komunikasi secara optimal • Pelayanan administrasi persuratan berbasis sistem elektronik • Pemanfaatan teknologi IT dalam pelayanan administrasi • Menata standar pelayanan kerumahtanggaan • Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan kerumahtanggaan secara maksimal • Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan terkait pelayanan rumah tangga pimpinan • Menata standard keprotokolan terhadap pimpinan • Meningkatkan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan • Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan akuntabilitas kinerja penyusunan

		• Penyusunan pedoman pelaksanaan akuntabilitas kinerja • Monitoring dan evaluasi capaian kinerja • Meningkatkan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat • Meningkatkan koordinasi dengan OPD guna mendapatkan data kelembagaan, ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja yang valid • Menyempurnakan regulasi dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja melalui program Reformasi Birokrasi
	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	• Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan antara perangkat daerah, dan kecamatan • Mengoptimalkan fasilitas urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah • Mendorong penyelesaian batas wilayah secara tertib dan akurat • Meningkatkan SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan • Menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan • Optimalisasi pemanfaatan anggaran hibah • Meningkatkan peran serta dan koordinasi antara perangkat daerah dan lembaga vertikal dalam bidang sosial dan kemasyarakatan • Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan pengkajian produk hukum • Meningkatkan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) • Optimalisasi dokumentasi dan informasi hukum berbasis teknologi • Penguatan peran bagian hukum sebagai pengendali regulasi daerah • Pengembangan jejaring kerjasama strategis lintas sektoral dan wilayah

		• Menata prosedur administrasi pelaksanaan bersama • Optimalisasi fungsi fasilitasi, mediasi, kerjasama daerah • Meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama
	Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	• Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi • Meningkatkan peran fasilitasi, advokasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan perekonomian • Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan BUMD • Tata Kelola BUMD • Menata prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan • Melakukan sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan • Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait • Menata standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa • Meningkatkan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement • Meningkatkan Pelaksanaan Lelang tepat waktu • Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan fasilitas pengelolaan sumber daya alam • Mendorong pemanfaatan sumber daya alam daerah secara optimal dan berkelanjutan • Memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam • Memastikan perlindungan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui koordinasi dan fasilitasi

3.3.2 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai langkah-langkah dan kerangka pemikiran atau kerangka kerja dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan isu-isu strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Staregi dan arah kebijakan Renstra Sekretaraiat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.3.2
Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029

Visi	: Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI” (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis, Mandiri dan Ber-Inovasi)		
Misi 2	: Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik		
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Penanggun Jawab
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	- Pendampingan, Sosialisasi/Bimbingan teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan serta keuangan - Rapat koordinasi capaian kinerja, dan peningkatan koordinasi dengan lingkup setda - Melaksanakan sinkronisasi, penyempurnaan dan perbaikan dokumen pendukung penilaian SAKIP Sekretariat Daerah - Desk/asistensi tentang dokumen SAKIP - asistensi, fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi lintas bagian setda Tanjab Barat	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		- Penetapan standar pelayanan administrasi - Peningkatan koordinasi antar instansi terkait - Peningkatan pemahaman tata naskah dinas - Penggunaan teknologi IT dalam pelayanan administrasi kesekretariatan - Peningkatan pemahaman Tupoksi Bagian Umum kepada personel - Optimalisasi penggunaan sarana komunikasi untuk mempercepat penyampaian informasi kesekretariatan - Penetapan standard pelayanan kerumahtanggaan	Bagian Umum

		- Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai - Peningkatan koordinasi dengan pimpinan	
		- Penetapan standard pelayanan keprotokolan - Peningkatan peliputan dan pendokumentasikan kegiatan pimpinan	Bagian Prokopim
		- Sosialisasi/Bimbingan teknis akuntabilitas kinerja - Desk/asistensi tentang dokumen AKIP - Rapat koordinasi capaian kinerja, Peningkatan koordinasi dengan Pusat/Provinsi - Peningkatan kualitas pelayanan fasilitasi, konsultasi dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan kinerja - Peningkatan koordinasi yang telah dilaksanakan dengan OPD - Penyempurnaan regulasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja melalui program reformasi birokrasi	Bagian Organisasi
	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	- Meningkatkan kualitas fasilitasi urusan pemerintahan umum - Menyusun regulasi dan pedoman yang mendukung penataan wilayah dan Penguatan peran camat dan perangkat camat dalam pelayanan publik - Penyelesaian tapal batas dan perselisihan wilayah secara partisipatif	Bagian Tata Pemerintahan
		- Peningkatan SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan - Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program keagamaan, sosial dan kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat

		- Pemberdayaan lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan - Dukungan terhadap kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan	
		- Penyusunan dan harmonisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah - Penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi perangkat daerah - Peningkatan akses informasi hukum bagi masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) - Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan perangkat daerah	Bagian Hukum
		- Mendorong kerjasama yang berbasis potensi dan kebutuhan daerah - Menyederhanakan proses administrasi kerjasama sesuai regulasi terkait kerjasama daerah - mengembangkan sistem informasi kerjasama yang terintegrasi dan transparan - koordinasi,fasilitasi untuk menjaring mitra strategis baik dari pemerintah, swasta, maupun luar negeri	Bagian Kerjasama
	Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	- Penguatan koordinasi perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi daerah - Penguatan Pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan perekonomian - Penguatan pembinaan dan pengawasan BUMD - Penataan Standar pengelolaan BUMD	Bagian Perekonomian
		- Harmonisasi dan penataan prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan	Bagian Administrasi Pembangunan

		- Sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan - Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	
		- Penataan standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - Peningkatkan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement - Pelaksanaan Lelang tepat waktu	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		- Fasilitasi penyusunan kebijakan dan regulasi daerah terkait pengelolaan SDA yang ramah lingkungan - Penguatan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan tentang pengelolaan SDA berkelanjutan melalui koordinasi dan fasilitasi - Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam, termasuk perizinan, konservasi dan rehabilitas - Koordinasi dan Fasilitasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam	Bagian Sumber Daya Alama

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
RENSAR Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029

Visi : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI” (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis, Mandiri dan Ber-Inovasi)				
Misi 2 : Berkah dalam peningkatan Tata Kelola pemerintahan dan Pelayanan publik				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Bagian
Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab	Meningkatkan Kapentensi SDM	Pendampingan, Sosialisasi/Bimbingan teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan serta keuangan	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatkan koordinasi, konsultasi terkait dokumen perencanaan dan keuangan lingkup sekretariat	Rapat koordinasi capaian kinerja, dan peningkatan koordinasi dengan lingkup setda	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatkan nilai dan capaian target Sakip Perangkat Daerah	Melaksanakan sinkronisasi, penyempurnaan dan perbaikan dokumen pendukung penilaian SAKIP Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Penyusunan pedoman pelaksanaan Sakip Perangkat Daerah	Desk/asistensi tentang dokumen SAKIP	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan dan keuangan	asistensi, fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi lintas bagian setda Tanjab Barat	Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Menata standar pelayanan administrasi	Penetapan standar pelayanan administrasi	Bagian Umum
		Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	Bagian Umum
		Pembinaan tata naskah dinas	Peningkatan pemahaman tata naskah dinas	Bagian Umum

		Pemanfaatan sarana komunikasi secara optimal	Penggunaan teknologi IT dalam pelayanan administrasi kesekretariatan	Bagian Umum
		Pelayanan administrasi persuratan berbasis sistem elektronik	Peningkatan pemahaman Tupoksi Bagian Umum kepada personel	Bagian Umum
		Pemanfaatan teknologi IT dalam pelayanan administrasi	Optimalisasi penggunaan sarana komunikasi untuk mempercepat penyampaian informasi kesekretariatan	Bagian Umum
		Menata standar pelayanan kerumahtanggaan	Penetapan standard pelayanan kerumahtanggaan	Bagian Umum
		Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelayanan kerumahtanggaan secara maksimal	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai	Bagian Umum
		Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan terkait pelayanan rumah tangga pimpinan	Peningkatan koordinasi dengan pimpinan	Bagian Umum
		Menata standard keprotokolan terhadap pimpinan	Penetapan standard pelayanan keprotokolan	Bagian Prokopim
		Meningkatkan peliputan dan pendokumentasian kegiatan pimpinan	Peningkatan peliputan dan pendokumentasikan kegiatan pimpinan	Bagian Prokopim
		Meningkatkan pengetahuan SDM Aparatur terkait dengan akuntabilitas kinerja	Sosialisasi/Bimbingan teknis akuntabilitas kinerja	Bagian Organisasi
		Penyusunan pedoman pelaksanaan akuntabilitas kinerja	Desk/asistensi tentang dokumen AKIP	Bagian Organisasi
		Monitoring dan evaluasi capaian kinerja	Rapat koordinasi capaian kinerja, Peningkatan koordinasi dengan Pusat/Provinsi	Bagian Organisasi

		Meningkatkan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas, konsultasi dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan kinerja	Bagian Organisasi
		Meningkatkan koordinasi dengan OPD guna mendapatkan data kelembagaan, ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja yang valid	Peningkatan koordinasi dengan OPD	Bagian Organisasi
		Menyempurnakan regulasi dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja melalui program Reformasi Birokrasi	Penyempurnaan regulasi dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja melalui program reformasi birokrasi	Bagian Organisasi
	Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan antara perangkat daerah, dan kecamatan	Meningkatkan kualitas fasilitasi urusan pemerintahan umum	Bagian Tata Pemerintahan
		Mengoptimalkan fasilitas urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Menyusun regulasi dan pedoman yang mendukung penataan wilayah dan Penguatan peran camat dan perangkat camat dalam pelayanan publik	Bagian Tata Pemerintahan
		Mendorong penyelesaian batas wilayah secara tertib dan akurat	Penyelesaian tapal batas dan perselisihan wilayah secara partisipatif	Bagian Tata Pemerintahan
		Meningkatkan SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan	Peningkatan SDM yang berdaya saing, dan kokohnya interaksi sosial, keagamaan, budaya, kesehatan, pendidikan dan kemasyarakatan	Bagian Kesra
		Menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan	Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program keagamaan, sosial dan kemasyarakatan	Bagian Kesra
		Optimalisasi pemanfaatan anggaran hibah	Pemberdayaan lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Bagian Kesra

		Meningkatkan peran serta dan koordinasi antara perangkat daerah dan lembaga vertikal dalam bidang sosial dan kemasyarakatan	Dukungan terhadap kegiatan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan	Bagian Kesra
		Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dan pengkajian produk hukum	Penyusunan dan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Bagian Hukum
		Meningkatkan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	Penyediaan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi perangkat daerah	Bagian Hukum
		Optimalisasi dokumentasi dan informasi hukum berbasis teknologi	Peningkatan akses informasi hukum bagi masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)	Bagian Hukum
		Penguatan peran bagian hukum sebagai pengendali regulasi daerah	Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan perangkat daerah	Bagian Hukum
		Pengembangan jejaring kerjasama strategis lintas sektoral dan wilayah	Mendorong kerjasama yang berbasis potensi dan kebutuhan daerah	Bagian Kerjasama
		Menata prosedur administrasi pelaksanaan kerjasama	Menyederhanakan proses administrasi kerjasama sesuai regulasi terkait kerjasama daerah	Bagian Kerjasama
		Optimalisasi fungsi fasilitasi, mediasi, kerjasama daerah	mengembangkan sistem informasi kerjasama yang terintegrasi dan transparan	
		Meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama	koordinasi,fasilitasi untuk menjaring mitra strategis baik dari pemerintah, swasta, maupun luar negeri	Bagian Kerjasama

	Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi	Penguatan koordinasi perencanaan dan evaluasi kebijakan ekonomi daerah	Bagian Perekonomian
		Meningkatkan peran fasilitasi, advokasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan perekonomian	Penguatan Pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan perekonomian	Bagian Perekonomian
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Pengutan pembinaan dan pengawsan BUMD	Bagian Perekonomian
		Meningkatkan Tata Kelola BUMD	Penataan Standar pengelolaan BUMD	Bagian Perekonomian
		Menata prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Harmonisasi dan penataan prosedur administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Bagian ADP
		Melakukan sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Sosialisasi tentang administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan	Bagian ADP
		Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait	Peningkatan koordinasi antar instansi terkait	Bagian ADP
		Menata standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa	Penataan standar pelayanan dan administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Bagian PBJ
		Meningkatkan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement	Peningkatkan Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara on-line /e-procurement	Bagian PBJ
		Meningkatkan Pelaksanaan Lelang tepat waktu	Pelaksanaan Lelang tepat waktu	Bagian PBJ
		Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan fasilitas pengelolaan sumber daya alam		Bagian SDA

		Mendorong pemanfaatan sumber daya alam daerah secara optimal dan berkelanjutan	Penguatan kapasitas dan kesadaran pemangku kepentingan tentang pengelolaan SDA berkelanjutan melalui koordinasi dan fasilitasi	Bagian SDA
		memperkuat koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam	Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam, termasuk perizinan, konservasi dan rehabilitasi	Bagian SDA
		Memastikan perlindungan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui koordinasi dan fasilitasi	Koordinasi dan Fasilitasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam	Bagian SDA

Selanjutnya Sasaran Strategi dimaksud merupakan dasar dalam perumusan program dan kegiatan serta subkegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Rencana Pendanaan

Bab IV Renstra Perangkat Daerah menyajikan rencana program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana program selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan, sub kegiatan serta penganggaran. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan indikator atau outcome program beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan untuk rencana kegiatan, sub kegiatan juga dilengkapi dengan indikator atau output kegiatan beserta target capainnya dan pagu indikatif. Indikator atau outcome program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Keuda Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai mana tabel 4.1 berikut :

**TABEL 4.2 RUMUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT							
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah - Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas Kinerja dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif dan efisien			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (*)		
					Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu (%)		
					Persentase realisasi anggaran belanja sekretariat daerah terhadap total pagu (%)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
					Nilai Kematangan Perangkat Daerah (*)		
					Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu pelayanan Minimal baik (B) (*)		
					Jumlah AKIP Perangkat Daerah berpredikat Minimal baik (B) (*)		
					Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (*)		
					Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik		Persentase perangkat daerah berpredikat minimal B (%)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

				Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

					(Laporan)		
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksanannya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksanannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

RENSTRA SETDA 2025-2029

					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
				Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
				Tersedianya Laporan Hasil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	

				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
- Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan			Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian (%)		
					Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik (*)		
					Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu (%)		
					Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90% (*)		
					Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE (%)		
					Persentase Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (%)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan SDA berkelanjutan (%)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Tersediannya Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
		Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga			Nilai/Skor LPPD (Angka)		
					Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)		
					Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi (*)		
					Indek Reformasi Hukum		
					Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan (%)		
					persentase Naskah MOU yang difasilitasi (%)		
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		Nilai/Skor LPPD (Angka)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

				Tersedianya Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	
				Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
				Terlaksananya Fasilitas dan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum	

RENSTRA SETDA 2025-2029

				Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum	
					Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum	
				Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah	

TABEL 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					151.186.915.859		158.935.617.087		166.152.367.911		174.640.141.784		174.640.141.784	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					118.782.156.304		124.950.066.087		129.989.951.611		136.550.390.684		136.550.390.684	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	100	118.782.156.304	100	124.950.066.087	100	129.989.951.611	100	136.550.390.684	100	136.550.390.684	Bagian Renkeu, Umum, Organisasi da

RENSTRA SETDA 2025-2029

pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100	100		100		100		100		100		Prokopim Setda
	Persentase perangkat daerah berpredikat minimal B (%)	77,27	77,27	79,55		81,82		84,09		86,36		86,36		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					14.505.915.555		14.711.651.000		14.983.516.300		15.290.851.100		15.290.851.100	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai/Skor LPPD (Angka)	2,64 (Sedang)	3,0 (Sedang)	3,2 (Sedang)	14.505.915.555	3,4 (Sedang)	14.711.651.000	3,46 (Tinggi)	14.983.516.300	3,5 (Tinggi)	15.290.851.100	3,5 (Tinggi)	15.290.851.100	Bagian Tapem, Kesra, Hukum & Kerjasama
	Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)	100	100	100		100		100		100		100		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					17.898.844.000		19.273.900.000		21.178.900.000		22.798.900.000		22.798.900.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian (%)	100	100	100	17.898.844.000	100	19.273.900.000	100	21.178.900.000	100	22.798.900.000	100	22.798.900.000	Bagian Ekonomi, ADP, PBJ dan SDA
	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan SDA berkelanjutan (%)	100	100	100		100		100		100		100		
TOTAL KESELURUHAN					151.186.915.859		58.935.617.087		166.152.367.911		174.640.141.784		174.640.141.784	

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
- Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD
- Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program
- Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
- Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 59. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber dayapembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 60. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan atau sub kegiatan dalam satu program.

- Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program yang tertuang dalam visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merumuskan Rencana Program, Kegiatan dan subkegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut:

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				151.186.915.859		158.935.617.087		166.152.367.911		174.640.141.784		174.640.141.784	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				118.782.156.304		124.950.066.087		129.989.951.611		136.550.390.684		136.550.390.684	
Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)	100	100	118.782.156.304	100	124.950.066.087	100	129.989.951.611	100	136.550.390.684	100	136.550.390.684	4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)	100	100		100		100		100				
	Persentase perangkat daerah berpredikat minimal B (%)	77,27	79,55		81,82		84,09		86,36				
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				642.315.000		665.075.000		667.075.000		653.075.000		653.075.000	
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Sekretariat daerah selaras dengan RPJMD	100%	100%	642.315.000	100%	665.075.000	100%	667.075.000	100%	653.075.000	100%	653.075.000	Bagian Perencanaan Dan Keuangan
	Persentase terpenuhinya komponen dokumen SAKIP dengan bobot 80	0	94%		95%		97%		98%		98%		
	Persentase kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran setda	80,50%	81,00%		81,35%		82,00%		82,50%		83,00%		
	Persentase kualitas laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasai kinerja dan Evaluasi Kinerja Setda	75%	80,10%		80,50%		81%		81,50%		82%		
	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, pelaporan dan keuangan yang dilaksanakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				275.275.000		280.275.000		285.275.000		290.275.000		290.275.000	

RENSTRA SETDA 2025-2029

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	275.275.000	4	280.275.000	4	285.275.000	4	290.275.000	4	290.275.000	
4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				148.500.000		158.500.000		150.000.000		125.000.000		125.000.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	148.500.000	1	158.500.000	1	150.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	
4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				75.500.000		78.000.000		78.500.000		80.500.000		80.500.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	75.500.000	1	78.000.000	1	78.500.000	1	80.500.000	1	80.500.000	
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				65.300.000		67.300.000		70.300.000		72.300.000		72.300.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4	4	65.300.000	4	67.300.000	4	70.300.000	4	72.300.000	4	72.300.000	
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				77.740.000		81.000.000		83.000.000		85.000.000		85.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	77.740.000	2	81.000.000	2	83.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				26.039.875.000		27.091.250.000		27.323.250.000		28.180.875.000		28.180.875.000	Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan tersusun dengan baik dan Benar	100%	100%	26.039.875.000	100%	27.091.250.000	100%	27.323.250.000	100%	28.180.875.000	100%	28.180.875.000	
	Persentase laporan keuangan bulanan/triwulan/tahunan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				24.500.500.000		25.520.500.000		25.720.500.000		26.520.500.000		26.520.500.000	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	131	131	24.500.500.000	132	25.520.500.000	132	25.720.500.000	133	26.520.500.000	133	26.520.500.000	
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.279.000.000		1.300.000.000		1.325.000.000		1.375.000.000		1.375.000.000	

RENSTRA SETDA 2025-2029

Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1.279.000.000	1	1.300.000.000	1	1.325.000.000	1	1.375.000.000	1	1.375.000.000	
4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				170.250.000		175.500.000		180.250.000		185.125.000		185.125.000	
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	170.250.000	1	175.500.000	1	180.250.000	1	185.125.000	1	185.125.000	
4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				90.125.000		95.250.000		97.500.000		100.250.000		100.250.000	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	2	90.125.000	2	95.250.000	2	97.500.000	2	100.250.000	2	100.250.000	
4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				170.250.000		175.125.000		180.500.000		185.750.000		185.750.000	Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola dengan Baik	100%	100%	170.250.000	100%	175.125.000	100%	180.500.000	100%	185.750.000	100%	185.750.000	
4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				170.250.000		175.125.000		180.500.000		185.750.000		185.750.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	170.250.000	1	175.125.000	1	180.500.000	1	185.750.000	1	185.750.000	
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.102.460.000		1.271.583.000		1.323.162.150		1.377.320.258		1.377.320.258	Bagian Umum
Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah	100%	100%	1.102.460.000	100%	1.271.583.000	100%	1.323.162.150	100%	1.377.320.258	100%	1.377.320.258	
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				982.460.000		1.031.583.000		1.083.162.150		1.137.320.258		1.137.320.258	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5	5	982.460.000	5	1.031.583.000	5	1.083.162.150	5	1.137.320.258	5	1.137.320.258	
4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				120.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000		240.000.000	

RENSTRA SETDA 2025-2029

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	12	120.000.000	24	240.000.000	30	240.000.000	30	240.000.000	30	240.000.000	
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.663.062.450		23.675.148.480		24.695.403.328		26.530.070.661		26.530.070.661	Bagian Umum
Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Kantor dan Pimpinan terpenuhi	100%	100%	22.663.062.450	100%	23.675.148.480	100%	24.695.403.328	100%	26.530.070.661	100%	26.530.070.661	
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.469.000.000		1.542.450.000		1.619.572.500		1.700.551.125		1.700.551.125	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	1.469.000.000	2	1.542.450.000	2	1.619.572.500	2	1.700.551.125	2	1.700.551.125	
4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.000.000.000		4.200.000.000		4.410.000.000		4.630.500.000		4.630.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	4.000.000.000	3	4.200.000.000	3	4.410.000.000	3	4.630.500.000	3	4.630.500.000	
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.500.000.000		6.825.000.000		7.166.250.000		7.524.562.500		7.524.562.500	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	6.500.000.000	5	6.825.000.000	5	7.166.250.000	5	7.524.562.500	5	7.524.562.500	
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				455.000.000		477.750.000		501.637.500		526.719.375		526.719.375	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	455.000.000	2	477.750.000	2	501.637.500	2	526.719.375	2	526.719.375	

RENSTRA SETDA 2025-2029

4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				-		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.239.062.450		10.629.948.480		10.997.943.328		12.147.737.661		12.147.737.661	Bagian Perencanaan dan Keuangan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	10.239.062.450	12	10.629.948.480	12	10.997.943.328	12	12.147.737.661	12	12.147.737.661	
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				17.160.000.000		18.018.000.000		18.918.900.000		19.864.845.000		19.864.845.000	Bagian Umum
Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Kantor dan Pimpinan terpenuhi	100%	100%	17.160.000.000	100%	18.018.000.000	100%	18.918.900.000	100%	19.864.845.000	100%	19.864.845.000	
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				11.050.000.000		11.602.500.000		12.182.625.000		12.791.756.250		12.791.756.250	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	14	8	11.050.000.000	10	11.602.500.000	12	12.182.625.000	15	12.791.756.250	15	12.791.756.250	
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.560.000.000		1.638.000.000		1.719.900.000		1.805.895.000		1.805.895.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2	2	1.560.000.000	2	1.638.000.000	2	1.719.900.000	2	1.805.895.000	2	1.805.895.000	
4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				4.550.000.000		4.777.500.000		5.016.375.000		5.267.193.750		5.267.193.750	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	53	52	4.550.000.000	50	4.777.500.000	53	5.016.375.000	55	5.267.193.750	55	5.267.193.750	
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.815.000.000		19.755.750.000		20.743.537.500		21.780.714.375		21.780.714.375	Bagian Umum
Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Sarana dan Prasarana Kantor dan Pimpinan terpenuhi	100%	100%	18.815.000.000	100%	19.755.750.000	100%	20.743.537.500	100%	21.780.714.375	100%	21.780.714.375	
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat				975.000.000		1.023.750.000		1.074.937.500		1.128.684.375		1.128.684.375	

RENSTRA SETDA 2025-2029

Menyurat													
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	975.000.000	2	1.023.750.000	2	1.074.937.500	2	1.128.684.37	2	1.128.684.375	
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4.640.000.000		4.872.000.000		5.115.600.000		5.371.380.000		5.371.380.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	4.640.000.000	3	4.872.000.000	3	5.115.600.000	3	5.371.380.000	3	5.371.380.000	
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.200.000.000		13.860.000.000		14.553.000.000		15.280.650.000		15.280.650.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	13.200.000.000	1	13.860.000.000	1	14.553.000.000	1	15.280.650.000	1	15.280.650.000	
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18.929.500.000		19.875.975.000		20.869.773.750		21.913.262.438		21.913.262.438	Bagian Umum
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Konsidi Baik	100%	100%	18.929.500.000	100%	19.875.975.000	100%	20.869.773.750	100%	21.913.262.438	100%	21.913.262.438	
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				7.279.000.000		7.642.950.000		8.025.097.500		8.426.352.375		8.426.352.375	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	145	150	7.279.000.000	160	7.642.950.000	165	8.025.097.500	170	8.426.352.375	170	8.426.352.375	
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				240.500.000		252.525.000		265.151.250		278.408.813		278.408.813	

RENSTRA SETDA 2025-2029

Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	93	100	240.500.000	105	252.525.000	110	265.151.250	115	278.408.813	115	278.408.813	
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.210.000.000		3.370.500.000		3.539.025.000		3.715.976.250		3.715.976.250	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	945	960	3.210.000.000	970	3.370.500.000	985	3.539.025.000	990	3.715.976.250	990	3.715.976.250	
4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				8.200.000.000		8.610.000.000		9.040.500.000		9.492.525.000		9.492.525.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	20	8.200.000.000	20	8.610.000.000	20	9.040.500.000	20	9.492.525.000	20	9.492.525.000	
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.596.922.118		1.730.262.347		1.861.732.071		1.874.348.769		1.874.348.769	Bagian Perencanaan Dan Keuangan
Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, bisaya operasional KDH dan WKDH	100%	100%	1.596.922.118	100%	1.730.262.347	100%	1.861.732.071	100%	1.874.348.769	100%	1.874.348.769	
4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				752.651.894		775.565.100		785.565.100		785.565.100		785.565.100	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	752.651.894	2	775.565.100	2	785.565.100	2	785.565.100	2	785.565.100	
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				104.270.224		114.697.247		126.166.971		138.783.669		138.783.669	
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	8	8	104.270.224	10	114.697.247	10	126.166.971	10	138.783.669	10	138.783.669	
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				140.000.000		140.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	0	8	140.000.000	8	140.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	

RENSTRA SETDA 2025-2029

4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				600.000.000		700.000.000		800.000.000		800.000.000		800.000.000	
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	600.000.000	2	700.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	2	800.000.000	
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				7.150.000.000		7.507.500.000		7.882.875.000		8.277.018.749		8.277.018.749	Bagian Umum
Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kantor dan Pimpinan	100%	100%	7.150.000.000	100%	7.507.500.000	100%	7.882.875.000	100%	8.277.018.749	100%	8.277.018.749	
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				3.900.000.000		4.095.000.000		4.299.750.000		4.514.737.499		4.514.737.499	
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	3	3.900.000.000	3	4.095.000.000	3	4.299.750.000	3	4.514.737.499	3	4.514.737.499	
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				1.950.000.000		2.047.500.000		2.149.875.000		2.257.368.750		2.257.368.750	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	3	3	1.950.000.000	3	2.047.500.000	3	2.149.875.000	3	2.257.368.750	3	2.257.368.750	
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				1.300.000.000		1.365.000.000		1.433.250.000		1.504.912.500		1.504.912.500	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	3	3	1.300.000.000	3	1.365.000.000	3	1.433.250.000	3	1.504.912.500	3	1.504.912.500	
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				1.546.870.000		1.555.225.500		1.598.736.700		1.631.791.100		1.631.791.100	Bagian Organisasi
Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan minimal sedang/tinggi	100%	100%	1.546.870.000	100%	1.555.225.500	100%	1.598.736.700	100%	1.631.791.100	100%	1.631.791.100	

RENSTRA SETDA 2025-2029

	Persentase perangkat daerah yang dilakukan survei	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan menyampaikan LKJIP tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				449.326.000		451.520.800		487.220.400		500.270.000		500.270.000	
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	2	2	449.326.000	2	451.520.800	2	487.220.400	2	500.270.000	2	500.270.000	
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				546.892.000		549.781.000		552.015.500		560.220.600		560.220.600	
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2	2	546.892.000	2	549.781.000	2	552.015.500	2	560.220.600	2	560.220.600	
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				550.652.000		553.923.700		559.500.800		571.300.500		571.300.500	
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2	2	550.652.000	2	553.923.700	2	559.500.800	2	571.300.500	2	571.300.500	
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2.965.901.736		3.629.171.760		3.925.006.112		4.281.319.334		4.281.319.334	Bagian Prokopim
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan yang Mendapatkan Pelayanan	100%	100%	2.965.901.736	100%	3.629.171.760	100%	3.925.006.112	100%	4.281.319.334	100%	4.281.319.334	
	Persentase Kegiatan Fasilitas komunikasi Pimpinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase kegiatan pimpinan yang didokumentasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				425.959.800		526.871.760		632.246.112		758.695.334		758.695.334	
Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	1	1	425.959.800	1	526.871.760	1	632.246.112	1	758.695.334	1	758.695.334	
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				564.975.000		702.300.000		842.760.000		1.011.312.000		1.011.312.000	
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1	1	564.975.000	1	702.300.000	1	842.760.000	1	1.011.312.000	1	1.011.312.000	
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1.974.966.936		2.400.000.000		2.450.000.000		2.511.312.000		2.511.312.000	
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1	1	1.974.966.936	1	2.400.000.000	1	2.450.000.000	1	2.511.312.000	1	2.511.312.000	
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				14.505.915.555		14.711.651.000		14.983.516.300		15.290.851.100		15.290.851.100	

RENSTRA SETDA 2025-2029

Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai/Skor LPPD (Angka)	2,64 (Sedang)	3,2 (Sedang)	14.505.915.555	3,4 (Sedang)	14.711.651.000	3,46 (Tinggi)	14.983.516.300	3,5 (Tinggi)	15.290.851.100	3,5 (Tinggi)	15.290.851.100	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)	100	100		100		100		100		100		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				482.100.000		584.801.000		696.666.300		844.001.100		844.001.100	Bagian Tapem
Tersedianya Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	100%	482.100.000	100%	584.801.000	100%	696.666.300	100%	844.001.100	100%	844.001.100	
	Persentase keterisian data penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dari 8 (delapan) perangkat daerah pengampu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Jumlah Penetapan administrasi batas wilayah kecamatan dan kelurahan		1 Kec, 1 Kel.		1 Kec, 1 Kel.		1 Kec, 1 Kel.		1 Kec, 1 Kel.		1 Kec, 1 Kel.		
	Jumlah Rapat Koordinasi dan pembinaan camat		1 Kali Rakor		1 Kali Rakor		1 Kali Rakor		1 Kali Rakor		1 Kali Rakor		
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				205.750.000		250.750.500		305.800.000		352.750.500		352.750.500	
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	2	2	205.750.000	2	250.750.500	2	305.800.000	2	352.750.500	2	352.750.500	
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				125.500.000		158.250.000		175.250.500		215.750.600		215.750.600	
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1	1	125.500.000	1	158.250.000	1	175.250.500	1	215.750.600	1	215.750.600	
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah				150.850.000		175.800.500		215.615.800		275.500.000		275.500.000	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	1	1	150.850.000	1	175.800.500	1	215.615.800	1	275.500.000	1	275.500.000	
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				11.712.053.790		11.641.850.000		11.641.850.000		11.641.850.000		11.641.850.000	Bagian Kesra

RENSTRA SETDA 2025-2029

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	7 Kegiatan	7 Kegiatan	11.712.053.790	7 Kegiatan	11.641.850.000	7 Kegiatan	11.641.850.000	7 Kegiatan	11.641.850.000	7 Kegiatan	11.641.850.000	
	Jumlah Masjid Paripurna		1 Masjid		3 Masjid		3 Masjid		3 Masjid		3 Masjid		
	Jumlah lembaga keagamaan yang mendapatkan bantuan hibah	45 Lembaga	45 Lembaga		40 Lembaga		40 Lembaga		40 Lembaga		40 Lembaga		
	Persentase fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua				8.376.295.790		8.000.000.000		8.000.000.00		8.000.000.000		8.000.000.000	
I													
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	8	7	8.376.295.790	6	8.000.000.000	6	8.000.000.000	6	8.000.000.000	6	8.000.000.000	
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				2.808.058.000		3.200.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000		3.200.000.000	
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	9	10	2.808.058.000	10	3.200.000.000	10	3.200.000.000	10	3.200.000.000	10	3.200.000.000	
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				527.700.000		441.850.000		441.850.000		441.850.000		441.850.000	

RENSTRA SETDA 2025-2029

Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4	2	527.700.000	2	441.850.000	2	441.850.000	2	441.850.000	2	441.850.000	
4.01.02.2.03 - Fasilitas dan Koordinasi Hukum				1.500.000.000		1.600.000.000		1.700.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000	Bagian Hukum
Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Jumlah Raperda yang diharmonisasi dan difasilitasi	10 Perda	10 Perda	1.500.000.000	10 Perda	1.600.000.000	10 Perda	1.700.000.000	10 Perda	1.800.000.000	10 Perda	1.800.000.000	
	Jumlah Raperbup yang diharmonisasi dan difasilitasi	30 Raperbup	30 Raperbup		30 Raperbup		30 Raperbup		30 Raperbup		30 Raperbup		
	Jumlah Kasus litigasi yg difasilitasi	2 Kasus	2 Kasus		2 Kasus		2 Kasus		2 Kasus		2 Kasus		
	Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Naskah PHD dan Peraturan Perundang-undangan yang didokumentasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah				350.000.000		380.000.000		410.000.000		440.000.000		440.000.000	
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	4	4	350.000.000	4	380.000.000	4	410.000.000	4	440.000.000	4	440.000.000	
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitas Bantuan Hukum				550.000.000		585.000.000		620.000.000		650.000.000		650.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum (Kasus)	10	2	550.000.000	2	585.000.000	2	620.000.000	2	650.000.000	2	650.000.000	
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				600.000.000		635.000.000		670.000.000		710.000.000		710.000.000	

RENSTRA SETDA 2025-2029

Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	5	5	600.000.000	5	635.000.000	5	670.000.000	5	710.000.000	5	710.000.000	
4.01.02.2.04 - Fasilitas Kerja Sama Daerah				811.761.765		885.000.000		945.000.000		1.005.000.000		1.005.000.000	Bagian Kerjasama
Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Fasilitas Kerjasama Daerah	Jumlah naskah kerjasama antar daerah/lembaga yang difasilitasi		20 naskah kerja sama	811.761.765	10 naskah kerja sama	885.000.000	10 naskah kerja sama	945.000.000	10 naskah kerja sama	1.005.000.000	10 naskah kerja sama	1.005.000.000	
	Persentase Kerjasama Lingkup dalam Negeri yang diimplementasikan	87%	90%		91%		92%		93%		95%		
	Jumlah fasilitas kegiatan kerjasama luar negeri		1		1		1		1		1		
	persentase monitoring dan evaluasi implemnetasi kerjasama	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri				347.892.065		380.000.000		400.000.000		420.000.000		420.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	1	1	347.892.065	1	380.000.000	1	400.000.000	1	420.000.000	1	420.000.000	
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri				300.000.000		320.000.000		340.000.000		360.000.000		360.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	1	1	300.000.000	1	320.000.000	1	340.000.000	1	360.000.000	1	360.000.000	
4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				163.869.700		185.000.000		205.000.000		225.000.000		225.000.000	
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	2	2	163.869.700	2	185.000.000	2	205.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				17.898.844.000		19.273.900.000		21.178.900.000		22.798.900.000		22.798.900.000	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sektor perekonomian (%)	100	100	17.898.844.000	100	19.273.900.000	100	21.178.900.000	100	22.798.900.000	100	22.798.900.000	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
	Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi pengelolaan SDA berkelanjutan (%)	100	100		100		100		100		100		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				15.250.000.000		16.450.000.000		17.650.000.000		18.850.000.000		18.850.000.000	Bagian Perekonomian

RENSTRA SETDA 2025-2029

Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase fasilitasi, koordinasi dan pembinaan sektor ekonomi dan pengelolaan BUMD	100%	100%	15.250.000.000	100%	16.450.000.000	100%	17.650.000.000	100%	18.850.000.000	100%	18.850.000.000	
	Jumlah BUMD yang dibina	3	3		3		3		3		3		
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12.000.000.000		13.000.000.000		14.000.000.000		15.000.000.000		15.000.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2	2	12.000.000.000	2	13.000.000.000	2	14.000.000.000	2	15.000.000.000	2	15.000.000.000	
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1.300.000.000		1.350.000.000		1.400.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	1	1	1.300.000.000	1	1.350.000.000	1	1.400.000.000	1	1.450.000.000	1	1.450.000.000	
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1.250.000.000		1.300.000.000		1.350.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	1	1	1.250.000.000	1	1.300.000.000	1	1.350.000.000	1	1.400.000.000	1	1.400.000.000	
4.01.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	1	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
4.01.03.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	1	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	
4.01.03.2.02 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				775.000.000		850.000.000		930.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Bagian ADP
Tersedianya Dokumen dan Laporan Hasil Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi penyusunan dokumen program/ kegiatan pembangunan daerah	100%	100%	775.000.000	100%	850.000.000	100%	930.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	

RENSTRA SETDA 2025-2029

	Persentase pematauan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase laporan evaluasi program/kegiatan pembangunan daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan				325.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000		400.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	1	325.000.000	1	350.000.000	1	375.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				225.000.000		250.000.000		275.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	1	1	225.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				225.000.000		250.000.000		280.000.000		300.000.000		300.000.000	
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1	225.000.000	1	250.000.000	1	280.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.325.000.000		1.325.000.000		1.850.000.000		2.100.000.000		2.100.000.000	Bagian PBJ
Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kesesuaian Perencanaan dengan pelaksanaan PBJ	100%	100%	1.325.000.000	100%	1.325.000.000	100%	1.850.000.000	100%	2.100.000.000	100%	2.100.000.000	
	Persentase Layanan Secara Elektronik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Tingkat kematangan standar layanan PBJ	6/9 Level 3	6/9 Level 3		6/9 Level 3		6/9 Level 3		6/9 Level 3		6/9 Level 3		
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				625.000.000		625.000.000		750.000.000		800.000.000		800.000.000	
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	165	200	625.000.000	250	625.000.000	300	750.000.000	300	800.000.000	300	800.000.000	
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				400.000.000		400.000.000		600.000.000		750.000.000		750.000.000	

RENSTRA SETDA 2025-2029

Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	44	44	400.000.000	44	400.000.000	44	600.000.000	44	750.000.000	44	750.000.000	
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				300.000.000		300.000.000		500.000.000		550.000.000		550.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	6	4	300.000.000	4	300.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000	4	550.000.000	
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				548.844.000		648.900.000		748.900.000		848.900.000		848.900.000	Bagian SDA
Tersedianya Dokumen Hasil Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi dan fasilitasi terkait pengelolaan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4 Kali	4 Kali	548.844.000	4 Kali	648.900.000	4 Kali	748.900.000	4 Kali	848.900.000	4 Kali	848.900.000	
	Jumlah koordinasi dan fasilitasi terkait pengelolaan bidang pertambangan dan lingkungan hidup	4 Kali	4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		
	Jumlah koordinasi dan fasilitasi terkait pengelolaan bidang Energi dan Air	4 Kali	4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				274.134.000		173.200.000		203.200.000		225.200.000		225.200.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	1	1	274.134.000	1	173.200.000	1	203.200.000	1	225.200.000	1	225.200.000	
4.01.03.2.04.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup				154.730.000		301.500.000		204.200.000		381.500.000		381.500.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	1	1	154.730.000	1	301.500.000	1	204.200.000	1	381.500.000	1	381.500.000	

RENSTRA SETDA 2025-2029

4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				119.980.000		174.200.000		341.500.000		242.200.000		242.200.000	
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1	1	119.980.000	1	174.200.000	1	341.500.000	1	242.200.000	1	242.200.000	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT				
1.	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			4.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			4.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	
			4.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			4.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			4.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			4.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

			4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
			4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			4.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			4.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
			4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
			4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
			4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	

2.	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan	
			4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
			4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
			4.01.02.2.02.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
			4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
			4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
			4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
			4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum	
			4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan	
			Pengelolaan Informasi Hukum	
			4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
			4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
			4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
			4.01.02.2.04.0003 - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan perlu diketahui kinerjanya. Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada penyelenggaraan bidang urusan adalah kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah. Kinerja merupakan kunci utama yang harus dilaksanakan dan dilakukan pengukuran setiap tahun untuk mengetahui tingkat keberhasilan capaian.

Dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Hal ini dimaksudkan agar indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Sekretariat Daerah yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terbagi secara jelas pembagian urusan pemerintahan baik urusan absolut maupun urusan konkuren. Begitu juga urusan konkuren terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretariat Daerah menjalankan fungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan. Tentunya berbeda dengan dinas-dinas daerah yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan baik yang wajib maupun pilihan sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan fungsi selaku penunjang urusan pemerintahan, maka ada beberapa indikator dan target kinerja selama 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi misi dalam RPJMD sebagaimana tabel di bawah ini :

RENSTRA SETDA 2025-2029

TABEL 4.3
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT											
1. Meningkatnya aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bertanggungjawab	Terwujudnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas Kinerja dan kelembagaan serta tata kelola keuangan yang transparan, efektif dan efisien	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (*)	77,19	80,01	82,10	83,00	84,50	85,10	85,10	
			Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu (%)	92	93	94	95	96	97	98	
			Persentase realisasi anggaran belanja sekretariat daerah terhadap total pagu (%)	92,31	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	94,50	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,34	86	86,5	87,5	88	88,3	88,3	
			Nilai Kematangan Perangkat Daerah (*)	35	36	37	38	39	40	40	
			Jumlah Perangkat Daerah dengan Mutu pelayanan Minimal baik (B) (*)	40	40	43	44	44	44	44	
			Jumlah AKIP Perangkat Daerah berpredikat Minimal baik (B) (*)	34	34	35	36	37	38	38	

RENSTRA SETDA 2025-2029

			Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (*)	0	80	85	87	88	88,3	88,3	
		Meningkatnya Koordinasi, fasilitasi dan optimalisasi pengelolaan sektor ekonomi, pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sektor perekonomian (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik (*)	1	1	1	2	2	3	3	
			Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu (%)	75	75	80	83	85	97	97	
			Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90% (*)	27	30	32	33	35	37	37	
			Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan SDA berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
		Terwujudnya tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya, dan sadar hukum melalui penguatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penyelenggaraan pemerintahan serta kerjasama antar daerah/lembaga	Nilai/Skor LPPD (Angka)	2,64 (Sedang)	3,0 (Sedang)	3,2 (Sedang)	3,4 (Sedang)	3,46 (Tinggi)	3,5 (Tinggi)	3,5 (Tinggi)	
			Persentase Bantuan sosial/hibah bidang keagamaan dan sosial yang tersalurkan tepat sasaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi (*)	3	2	2	1	1	1	1	
			Indeks Reformasi Hukum	0	83	85	86	87	88	88	
			Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			persentase Naskah MOU yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	

Pada tabel 4.2. disampaikan bahwa indikator kinerja pada sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 19 indikator yang merupakan tolak ukur untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang dan mencerminkan dukungan Sekretariat Daerah dalam pencapaian target RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Sasaran Strategis terbagi menjadi 3 (Tiga) kategori indikator yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. IKU adalah alat ukur yang menggambarkan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Bidang Urusan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029**

NO	INIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN						KE T
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
1.	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Sekretariat Daerah	Nilai / Predikat	80,01 (A)	82,10 (A)	83,00 (A)	84,50 (A)	85,10 (A)	85,10 (A)	IKU
2.	Persentase Rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persentase	93%	94%	95%	96%	97%	97%	IKU
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan sekretariat daerah	Nilai / Predikat	86	86,5	87,5	88	88,3	88,3	IKU
4.	Jumlah Perangkat Daerah dengan mutu pelayanan minimal baik (B)	Jumlah	40	43	44	44	44	44	IKU
5.	Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)	Jumlah	34	35	36	37	38	38	IKU
6.	Nilai / Skor LPPD	Nilai / Skor	3,0 (Sdg)	3,2 (Sdg)	3,4 (Sdg)	3,46 (Tinggi)	3,5 (Tinggi)	3,5 (Tinggi)	IKU

7.	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Peringkat / Juara	Juara 2 Umum	Juara 2 Umum	Juara 1 Umum	Juara 1 Umum	Juara 1 Umum	Juara 1 Umum	IKU
8.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks/ Katagori	83	85	86	87	88	88	IKU
9.	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU
10.	Persentase Naskah MOU yang difasilitasi	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU
11.	Persentase pelaksanaan fasilitas dan koordinasi sektor perekonomian	persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKU
12.	Jumlah BUMD dalam Kondisi Baik	Jumlah	1	1	2	2	3	3	IKU
13.	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan LPPK tepat waktu	Persentase	75%	80%	83%	85%	97%	97%	IKU

2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan Daerah yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah, Indikator Kinerja Daerah (IKD) terkait dengan urusan Sekretariat Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029

NO	INIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
1.	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai / Angka	36	37	38	39	40	40	IKD
2.	Jumlah AKIP Perangkat Daerah Berpredikat Minimal Baik (B)	Jumlah	34	35	36	37	38	38	IKD
3.	Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Peringkat / Juara	Juara 2 Umum	Juara 2 Umum	Juara 1 Umum	Juara 1 Umum	Juara 1 Umum	Juara 1 Umum	IKD

4.	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron dengan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKD
5.	Persentase pelaksanaa fasilitas dan koordinasi sektor perekonomian	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKD
6.	Jumlah Perangkat Daerah yang realisasi keuangan dan fisik diatas 90%	Jumlah	30	32	33	35	37	37	IKD
7.	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Pengadaan barang/jasa melalui LPSE	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKD

3. Indikator Kinerja Kunci

Salah satu program pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025-2029 adalah pembangunan **Religius (Ber-Ahlak dan Toleransi)**. Nilai-nilai religius merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang berintegritas, bermoral, dan harmonis. Pilar Religius dalam visi Berkah Madani menegaskan komitmen Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk membangun karakter masyarakat dan aparatur yang berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, serta menjadikan toleransi antarumat beragama sebagai kekuatan sosial dalam menjaga persatuan dan kedamaian.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus mendorong penguatan peran lembaga keagamaan, rumah ibadah, dan tokoh-tokoh agama dalam pendidikan moral dan spiritual masyarakat. Program pembinaan mental-spiritual masyarakat serta kegiatan keagamaan lintas agama didorong untuk memperkuat rasa saling menghormati dan mempererat kohesi sosial di tengah keberagaman budaya dan keyakinan.

Sekretariat Daerah pada bagian Kesejahteraan Rakyat bereperan penting dalam mewujudkan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang **Relegius (Ber-Ahlak dan Toleransi)** melalui fungsi sekretariat daerah sebagai fasilitasi kebijakan, koordinasi dan administrasi dengan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Pemberian Sepeda Motor Untuk Para Da'i, dan Pemberian Honorarium.

Sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius dan berahlak, serta sebagai penghargaan atas dedikasi para tokoh keagamaan dan pelayan sosial di tengah masyarakat, Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan program pemberian sepeda motor untuk Da'i, honorarium bagi da'i, guru ngaji, pengurus masjid/musholla, guru pondok pesantren, dan petugas pemandian jenazah. Para Da'i mempunyai peran besar dalam membentuk karakter moral, spiritual, dan sosial masyarakat.

2. Pembentukan rumah ibadah paripurna di setiap kecamatan

Sebagai daerah dengan kondisi majemuk dengan masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial dengan perbedaan agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen untuk terus memperkuat peran dan fungsi lembaga keagamaan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui pembentukan Rumah Ibadah Paripurna di setiap kecamatan, sebagai pusat pembinaan, pelayanan, dan penguatan umat beragama secara menyeluruh.

Dalam rangka mewujudkan program pembangunan daerah khususnya program Relegius (**Religius (Ber-Ahlak dan Toleransi)**), Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Renstra berupaya mewujudkan dan mengakomodir dengan menjadikan sebagai Indikator Kinerja Kunci sebagai kinerja yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pelaksanaan program secara lebih rinci dan teknis.

**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Bidang Urusan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029**

NO	INIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
1.	Jumlah Da'l yang mendapatkan bantuan Sepeda Motor	Jumlah	134	-	-	-	-	-	IKK
2.	Jumlah Da'l yang mendapatkan honorarium	Jumlah	134	134	134	134	134	134	IKK
3.	Jumlah Tentang Imam Masjid, Guru Ngaji Dan Kaum Masjid Desa/Kelurahan yang mendapatkan honorarium	Jumlah	6779	6779	6779	6779	6779	6779	IKK
4.	Jumlah petugas pemandian jenazah yang mendapatkan honorarium	Jumlah	-	2000	2000	2000	2000	2000	IKK
5.	Jumlah rumah ibadah yang di tetapkan sebagai rumah ibadah paripurna	Jumlah	1	3	3	3	3	-	IKK

BAB V PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini disusun untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam kerangka visi dan misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur staf dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, sub Kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran Rencana Kerja dan RKA di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur staf merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan tugas pokok fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijabarkan dalam Rencana Kerja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj-IP), yang selanjutnya akan menjadi bukti pencapaian.

Dari seluruh uraian yang tersaji pada setiap BAB dalam buku ini, dengan masing-masing cakupan isinya secara keseluruhan saling berkaitan dan merupakan rangkaian rencana Strategis pengelolaan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk jangka waktu Tahun 2025- 2029.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan komitmen perencanaan dari Pemangku Kepentingan di Sekretariat Daerah yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Uraian pada Bab II dengan kedalaman materi substantif terkait bidang tugas Sekretaris Daerah, yakni masalah kinerja pelayanan dan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan. Sedangkan Bab. III sampai dengan Bab IV merupakan rangkaian proses perumusan rencana Strategis sehingga diperoleh rumusan strategi serta kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran Strategis. Perpaduan kedua materi rumusan tersebut diharapkan dapat menambah kualitas Rencana Strategis yang disusun sehingga benar – benar dapat memperbaiki kinerja organisasi.

Demikian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Oktober 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,



HERMANSYAH, S.STP.MH
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19820411 200112 1 001